



RENCANA KERJA 2020



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA CIMAH**

Jl. Daeng Moch. Ardiwinata 41 Cihanjuang Kota Cimahi
Telp./Fax. (022) 20661899

TANGGAP

TANGKAS

TANGGUH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan rumusan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi yang merupakan rencana program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi ini khusus memuat program dan kegiatan tahun 2020 yang mengacu kepada Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi ini diharapkan tercipta dukungan dari semua pihak sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan bersama dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Cimahi Baru yang maju, agamis dan berbudaya.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi sehingga terwujudnya Renja ini. Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kemajuan Kota Cimahi, dengan tangan terbuka disertai hati yang tulus ikhlas, tentu sangat kami harapkan. Semoga Renja ini bermanfaat dan dapat memenuhi harapan kita semua.

Cimahi, Maret 2019

KERALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



NANANG, S.Pd., M.Pd
NIP.196401051984101006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang berisi rencana pembangunan tahunan daerah. Selain itu Undang-Undang ini mengatur keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD. Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang baru terbentuk pada tahun 2015 ini dalam rangka meningkatkan Kinerja terus melakukan evaluasi dan analisis kajian berdasarkan data kuantitatif dan kinerja untuk bahan perumusan strategi pengembangan ke depan dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Kota Cimahi.

Hasil perumusan strategi ini disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Cimahi. Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

1.1.1 Struktur Organisasi BPBD Kota Cimahi

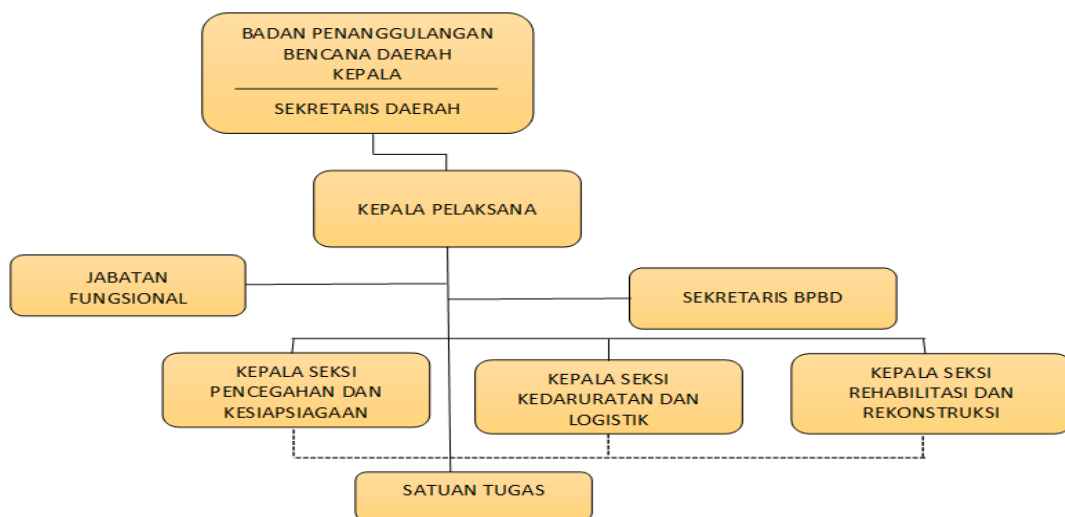
Didalam menjalankan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 195) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Pelaksana
- c. Sekretaris
- d. Kepala Seksi
- e. Jabatan Fungsional

Sedangkan bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Bagan Struktur organisasi BPBD Kota Cimahi



1.1.2. Susunan Kepegawaian

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi didukung oleh sumber daya manusia yang berstatus sebagai pegawai yang bertugas menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Jumlah pegawai pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 berdasarkan golongan dan unit kerjanya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cimahi Berdasarkan Golongan dan Unit Kerja Tahun 2019

No	Jabatan/Bagian	Gol/ Ruang	Jenjang pendidikan	Jumlah Personil
1.	Kepala Pelaksana	IV/a	S1	1
2.	Sekretaris	III/d	S1	1
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	III/d	S2	1
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	III/d	S1	1
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	III/d	S2	1
6.	Unsur Pelaksana	IV	S1	1
		III	S2	2
			S1	10
		II	SMA	7
		I	SMP	1
Jumlah				26

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

-
- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 (Lembaran Dearah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161);
 14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
 15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Cimahi

-
16. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada BPBD Kota Cimahi

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Cimahi
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cimahi

-
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA CIMAHI

V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD KOTA CIMAHI TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja BPBD Kota Cimahi merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kota Cimahi tahun 2017-2022. Tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja BPBD Kota Cimahi ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kota Cimahi selama tahun 2018 atau tahun kedua perencanaan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Realisasi belanja tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.480.074.627 atau sebesar 81,18 % dari anggaran 2018 yang berjumlah Rp. 6.750.296.317. Besaran realisasi belanja tersebut merupakan realisasi dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri 37 Kegiatan pada 7 Program. Belanja operasional dan belanja langsung pada BPBD Kota Cimahi tahun 2018 dapat dilihat pada rincian berikut ini :

1. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 2.986.751.765,00 atau sebesar 86,71% dari anggaran tahun 2018 yang berjumlah Rp. 3.550.837.000,00 terdiri dari :

- Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.212.681.765,00
- <u>Tambahan Penghasilan PNS</u>	<u>Rp. 1.774.070.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.986.751.765,0

2. Belanja Barang

- Belanja barang dan jasa adalah sebesar Rp. 2.449.210.862 atau 77,67% dari anggaran Rp. 3.153.159.317 terdiri dari :

No	Uraian	Realisasi
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.076.577
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	28.309.700
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	13.595.905
5.	Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan	66.609.000
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.835.000
7.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.530.000
8.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.927.000
9.	Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan	31.853.500
10.	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
11.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.625.000
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.280.000
13.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000
14.	Penyediaan bahan logistik kantor	25.643.000
15.	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	36.625.000
16.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	253.078.000
17.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	63.999.599
18.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	950.000
19.	Kegiatan Penyediaan Gudang	160.000.000
20.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	39.500.000
21.	Kegiatan Pembinaan Pegawai	10.200.000

No	Uraian	Realisasi
22.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.807.263
23.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	113.557.634
24.	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1,758.000
25.	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.293.000
26.	Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi	36.112.000
27.	Kegiatan Peningkatan Pemantauan Kinerja Pada SKPD	225.000
28.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	148.851.134
29.	Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana	148.851.134
30.	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	1.202.993.150
31.	Kegiatan Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan	143.788.200
32.	Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	197.430.200
33.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana	335.578.000
34.	Kegiatan Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana	37.815.000
35.	Kegiatan Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana dan Peralatan yang Lebih Baik	37.470.000
36.	Kegiatan Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana	207.086.500
37.	Kegiatan Kajian Mitigasi Bencana	56.130.000
TOTAL		2.449.210.862

3. *Belanja Modal*

- Belanja Modal adalah sebesar Rp. 44.112.000,00 atau 95,27 % dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 46.300.000,00 terdiri dari belanja pengadaan :

No.	Uraian	Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	14.612.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan	1.700.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	15.600.000,00

No.	Uraian	Realisasi
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Buku	9.800.0000,00
	TOTAL	44.112.000,00

Anggaran Belanja Langsung BPBD Kota Cimahi tahun 2018 yang bersumber dari dana APBD digunakan untuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp.736.639.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 648.099.682,00 atau 87,98 %.
Terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan. Terdiri dari :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
5. Kegiatan Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Keuangan
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
9. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14. Penyediaan bahan logistik kantor
15. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
16. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	736.639.000,00	648.099.682,00
Keluaran	Jumlah surat	120 Surat	110 Surat
	Jumlah bulan lancarnya komunikasi dan listrik	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	5 Unit	5 Unit
	Jumlah kendaraan yang dipelihara	5 Unit	5 Unit
	Jumlah orang jasa administrasi keuangan	3 Bulan	3 Bulan
	Jumlah bulan pembayaran honor tenaga harian lepas; 12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	31 Jenis	31 Jenis
	Jumlah orang tenaga kebersihan	1 Orang	1 Orang
	Jumlah unit peralatan kerja;	29 Unit	29 Unit
	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 Jenis	14 Jenis
	Jumlah bulan sewa repeater;	6 Bulan	4 Bulan
	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	8 Jenis
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	12 Jenis	12 Jenis
	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah paket peraturan perundang-undangan	1 Paket	1 Paket
	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan
Hasil	Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 242.255.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 224.949.599,00 atau 92,86 % Terdiri dari 4 (empat) kegiatan, terdiri dari :

1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4. Kegiatan Penyediaan Gudang

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 242.255.000,00	Rp. 224.949.599,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara Rutin/Berkala dan Mendapatkan BBM serta Pelumas	5 Unit	5 Unit
	Jangka Waktu Pemeliharaan kendaraan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	4 Jenis	4 Jenis
	Jangka waktu pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan
	Jumlah Gedung yang disewa Untuk Kantor	1 Gedung	1 Gedung
	Jangka Waktu Sewa Gedung	1 Tahun	1 Tahun
Hasil	Lancarnya kegiatan operasional aparatur dan administrasi perkantoran	100 %	100%

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 39,500.000,00 atau 98,75 %. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	40.000.000,00	39,500.000,00
Keluaran	Jumlah set pakaian	20 Set	20 Set
Hasil	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 87.050.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 57.007.263,00 atau 59,91 %.

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu :

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	87.050.000,00	57.007.263,00
Keluaran	Jumlah pembinaan pegawai	4 Kali	4 Kali
	Jumlah ASN yang dilatih	2 Orang	2 Orang
Hasil	Meningkatnya kemampuan dan kapasitas aparatur BPBD	100%	100%

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 272.145.400,00 telah terealisasi sebesar Rp. 171.922.034,00 atau 63,17%. Terdapat 6 (enam) kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Kegiatan Perencanaan Data, Monitoring dan Evaluasi
5. Kegiatan Peningkatan Pemantauan Kinerja pada SKPD
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	272.145.400,00	171.922.034,00
Keluaran	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;	9 Dokumen	9 Dokumen
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	1 Dokumen RPB	1 Dokumen RPB
	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen
	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan;	12 Dokumen	12 Dokumen
	Jumlah dokumen laporan capaian keuangan dan ikhtisar realisasi keuangan	12 Dokumen	12 Dokumen
Hasil	Penyusunan dokumen sistem capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100 %	100%

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.327.379.250,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.202.993.150,00 atau 90,63 %. Terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, yaitu :

1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
2. Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan
3. Pengelolaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
4. Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana
5. Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana
6. Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana dan Peralatan yang Lebih Baik
7. Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana
8. Kajian Mitigasi Kebencanaan

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	Rp. 885.159.000,00	Rp. 780.865.300,00
Keluaran	Jumlah wilayah yang dipantau	15 Keluarah	15 Keluarah
	Jumlah kegiatan simulasi	1 kegiatan simulasi	1 kegiatan simulasi
	Jumlah paket obat P3K dan alat kesehatan	4 Paket	4 Paket
	Jumlah jenis barang/logistik bagi korban bencana	8 Jenis	8 Jenis
	Jumlah peserta pelatihan	15 Orang	15 Orang
	Jumlah kegiatan pemeliharaan kesehatan dan kaji cepat kebutuhan dasar korban bencana;	2 Kegiatan	2 Kegiatan
	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang	50 Orang
	Jumlah paket sewa eskavator dan dump truck	2 Paket	-
	Jumlah lokasi pemulihan	1 Lokasi	-
	Jumlah peserta pelatihan	100 orang	100 orang
	Jumlah dokumen kajian sumber daya dan peralatan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah dokumen kontijensi	1 Dokumen	1 Dokumen
	Jumlah dokumen kajian	1 dokumen mitigasi bencana	1 dokumen mitigasi bencana
Hasil	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100 %	100 %

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Cimahi tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

1. Simulasi Bencana Gempa Bumi Dan Kebakaran

Simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran dilaksanakan di STIKES Jendral Ahmad Yani yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2018 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Gladi lapangan dalam rangkaian persiapan
2. Apel relawan dalam rangka HKBN 2018
3. Pelaksanaan Simulasi Bencana Gempa Bumi dan kebakaran oleh mahasiswa STIKES Jendral Ahmad Yani.
4. Pelaksanaan simulasi melibatkan sebanyak 500 orang diantaranya dari mahasiswa STIKES Jendral Ahmad Yani, Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, PMI, Tagana, Senkom, Orari, KIC dan yang lainnya.

2. Kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Kota Cimahi. Kegiatan Pembentukan FPRB Kota Cimahi dilaksanakan di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 19 November 2018. Jumlah peserta yang hadir adalah sebanyak 106 Orang yang terdiri dari Perangkat Daerah, TNI, POLRI, KEJARI, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Keagamaan, Dunia Usaha dan unsur relawan Kota Cimahi.

3. Cetak Peta Potensi Rawan Bencana Kota Cimahi, Sub Kegiatan Cetak

Peta Rawan Bencana bertujuan sebagai penyebarluasan informasi potensi bencana alam yang berada di wilayah Kota Cimahi sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mewaspadaai potensi bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi di wilayah masing-masing dan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi. Pemasangan peta rawan bencana dipasang di

setiap Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, POLRES, Kantor DPRD, Rumah sakit dan di Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi.

2) Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan

Kegiatan Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan dilaksanakan di Kampung Sumber Alam Resort Jl. Raya Cipanas No. 122, Pananjung, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut 44151 pada tanggal 19 s/d 21 September 2018. Jumlah peserta hadir berjumlah 51 orang yang terdiri dari 26 orang ASN dan 25 orang Non-ASN.

Maksud yang ingin dicapai dari Kegiatan Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan bagi aparat dan masyarakat dalam upaya deteksi daerah rawan bencana;
- b. Terbentuknya jejaring informasi yang sinergis dan berkelanjutan dalam mendeteksi daerah potensi bencana antara aparat dan masyarakat;
- c. Tersosialisasinya informasi mengenai daerah-daerah rawan bencana.

3) Pengelolaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara dapat kami sampaikan sebagai berikut :

a. Belanja Jasa Pendukung Kegiatan Non-PNS

Tenaga pendukung kegiatan non-PNS merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang memiliki fungsi dalam mendukung kegiatan-kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik pada upaya Tanggap Darurat Bencana serta kegiatan-kegiatan internal seksi.

Personil yang direkrut berjumlah 3 orang sebagai personil pengelola gudang logistik dan peralatan dengan waktu kerja 7 x 24 jam sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dan Bahan Material Obat (Obat dan alat Kesehatan P3K)

- **Pengadaan Logistik/barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga**

Pengadaan barang dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 melihat aspek ketersediaan barang dan perubahan rincian barang yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Rincian barang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Barang Logistik

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Pembersih Lantai 800 ml	96	Buah
2	Sleber Lantai	96	Buah
3	Ember Plastik	96	Buah
4	Air Mineral	7188	Botol
5	Minyak Goreng	155	Leter
6	Mie Instant	4000	Bungkus
7	Sarden	150	Pcs
8	Kornet	150	Pcs

- **Pengadaan Bahan Material Obat (Obat-Obatan dan Alat Kesehatan P3K)**

Pengadaan barang dilaksanakan pada bulan Desember 2018 melihat aspek ketersediaan barang. Barang yang dibeli berupa obat-obatan golongan bebas dan alat-alat kesehatan yang menunjang kegawatdaruratan (P3K). Rincian barang sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rincian Bahan Material Obat

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	Antasida Doen Tablet 100	box	10
2	Paracetamol Tablet	box	10
3	Ondansetron Tablet 4 Mg	box	10
4	Klorfeniranine Maleat (CTM) 4 Mg	box	2
5	ASAM MEFEANAT 500 Mg	box	7
6	Ranitidine 150 MG	box	6
7	Metamizole Sodium 500 Mg	box	6
8	Counterpaen	tub	10
9	Bioplacenton Jell	tub	10
10	Sarung Tangan Non Steril @ 100	box	2
11	Masker 3 Ply Ear Loop	box	2
12	Ecodine 30 MI	btI	10
13	Chlor Ethyl	klg	3
14	Lenos Pure Oxygen	btI	6
15	ALCOHOL 70% 100 MI	btI	12
16	Rivanol Solution	btI	10
17	Kasa Steril 16 X 16	rol	10
18	Verband 10 Cm	rol	10
19	Verband 5 Cm	rol	10
20	Isoplast 1,25 X 4,25	rol	10
21	Isoplast Besar	rol	4
22	Tensimeter	unit	2
23	Stetoscope	pcs	2

4) Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana

Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Pendukung Kegiatan Non-PNS

Tenaga pendukung kegiatan non-PNS merupakan sumber daya manusia yang direkrut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang memiliki fungsi dalam mendukung kegiatan-kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik pada upaya Tanggap Darurat Bencana serta kegiatan-kegiatan internal seksi.

Personil yang direkrut berjumlah 9 orang terbagi pada 6 orang sebagai personil kaji cepat (*repid assessment*) dan 3 orang sebagai personil Pusat Data dan Pengendali Operasi (*Pusdalops*) dengan waktu kerja 7 x 24 jam sesuai jadwal yang ditentukan.

b. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Personil

1. Pelatihan Dasar Kebencanaan

Pelatihan dasar kebencanaan dilakukan sebanyak 4 kali kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

- **Pelatihan Asessment Tanggap Darurat Bencana**

Kegiatan dilaksanakan tanggal 15 Februari 2018 di Kantor BPBD Kota Cimahi dengan narasumber berasal dari Komandan Resque 724 merangkap sebagai Kepala Bidang Pembudayaan Olah Raga di Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat Bapak Drs. Dadang Abdulrahman, M.Si., memaparkan materi sebagai berikut: Protap Tim TRC 2014, Protap TRC dan Management Posko.

- **Pembinaan Kebugaran**

Kegiatan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2018 di Kantor BPBD Kota Cimahi dan Lapang Arhanut Kota Cimahi dengan Narasumber berasal dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat Bpk. Noor Aliroza, S.Pd. Uraian kegiatan berupa pemaparan materi tentang pembinaan kebugaran dilanjutkan test kebugaran. Hasil test kebugaran personil tenaga pendukung kegiatan Non-PNS sebagai berikut:

Tabel 2.3
Hasil Tes Kebugaran Personil

NO	NAMA	USIA	WAKTU TEMPUH (menit/detik)	VO2MAX (ml/kg/menit)	HASIL KEBUGARAN
1	IWA	40	9.40	38	BAIK
2	DIAN KUSUMAH	32	9.42	38	CUKUP
3	TAMZIS	25	10.01	37	CUKUP
4	DASEP	28	11.05	34	CUKUP

5	GOGOT SUTARTO	47	11.06	34	CUKUP
6	YUSUF SIDIK	31	11.15	34	CUKUP
7	INDRA PERMANA	29	11.23	34	CUKUP
8	AMIN RAMDAN	35	11.24	34	CUKUP
9	REZA FAHMI	31	11.41	33	CUKUP
10	M. SODIK	48	14.48	28	CUKUP
11	JAKA UMBARA	25	14.54	28	KURANG

- **Pelatihan Management Posko Tanggap Darurat**

Kegiatan dilaksanakan tanggal 18 April 2018 di Kantor BPBD Kota Cimahi narasumber berasal dari Anggota Resque 724 merangkap Fasilitator BPBD Kota Cimahi Muhamad Arif Nurdwiansyah dan Ipi Mupliana dengan memaparkan materi tentang manajemen posko tanggap darurat bencana guna mendukung kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) tahun 2018.

- **Evaluasi Kebugaran Personil**

Kegiatan dilaksanakan tanggal 26 November 2018 di Kantor BPBD Kota Cimahi dan Lapangan Arhanut serta Kolam Renang Pandiga Jati Kota Cimahi dengan Narasumber berasal dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Barat Bpk. Noor Aliroza, S.Pd. Uraian kegiatan berupa test kebugaran dan report hasil test kebugaran. Hasil test evaluasi kebugaran personil tenaga pendukung kegiatan Non-PNS sebagai berikut:

Tabel 2.4
Hasil Tes Kebugaran Personil

NO	NAMA	USIA	PULL UP	SIT UP	BACK UP	SHUTTLE RUN	LARI 15 MENIT	RENANG
1	JAKA UMBARA	26	0	26	44	13,8	1300 M	110 Sec
2	INDRA PERMANA	30	8	39	53	13,84	2000 M	111 Sec
3	DIAN KUSUMAH	32	16	39	53	12,8	2200 M	111 Sec
4	TAMZIS	26	14	30	49	12,6	1400 M	80 Sec
5	DASEP SAEPUL R	29	6	23	65	12,68	1600 M	85 Sec
6	YUSUF SIDIK	31	17	30	68	12,68	2000 M	168 Sec

7	GOGOT SUTARTO	47	11	24	72	13,28	1300 M	0
8	IWA	41	19	30	87	12,8	2400 M	87 sec
9	AMIN RAMDAN	35	16	23	60	13,43	2000 M	125 Sec
10	M. SODIK	CEDERA OTOT (SAKIT)						
11	REZA FAHMI	IZIN						

Tabel 2.5
Evaluasi Kebugaran Personil

NO	NAMA	PREDIKAT	KETERANGAN
1	JAKA UMBARA	KURANG	Analisis: Lemah pada aspek kekuatan otot lengan serta perut dan lemah pada aspek kardiovaskular (daya tahan jantung) akan tetapi cukup baik pada aspek kelenturan otot pinggang.
2	INDRA PERMANA	KURANG	Analisis : tidak terlalu bagus dalam aspek kekuatan otot lengan dan kardiovaskular
3	DIAN KUSUMAH	CUKUP	Analisis : Termasuk Kategori cukup dalam hal kekuatan dan kelenturan, akan lebih baik ditingkatkan dalam hal kardiovaskular
4	TAMZIS	KURANG	Analisis: Sangat lemah dalam hal aerobik, daya tahan jantung dan kekuatan otot lengan
5	DASEP SAEPUL ROHMAN	KURANG	Analisis: Bagus dalam hal Kelenturan dan teknik Aquatik namun lemah pada aspek kekuatan otot lengan dan perut
6	YUSUF SIDIK	CUKUP	Analisis: Termasuk Kategori Cukup baik namun teknik Aquatik/berenang kurang, akan lebih baik apabila memperbaiki teknik berenang.
7	GOGOT SUTARTO	KURANG	Analisis: termasuk Cukup pada kategori kelenturan, namun lemah di aspek kekuatan, daya tahan jantung, aerobik dan teknik aquatic
8	IWA	CUKUP	Analisi : Sangat baik dalam hal aerobik, daya tahan jantung dan kelenturan, cukup pada aspek kekuatan otot dan teknik berenang
9	AMIN RAMDAN	KURANG	Analisis: Cukup baik dalam hal kekuatan otot dan kelincahan namun kurang dalam hal kelenturan dan teknik berenang

2. Latihan Gabungan Tanggap Darurat Bencana

Latihan Gabungan Tanggap Darurat Bencana dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan personil yang bergerak dalam upaya tanggap darurat bencana yaitu Pemadam Kebakaran, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Palang Merah Indonesia (PMI) dan BPBD

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 18 Desember 2018 di Ciwangun Indah Camp (CIC) Kabupaten Bandung Barat. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang dengan narasumber serta instruktur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Bentuk kegiatan berupa pemaparan materi serta gladi posko tanggap darurat.

5) Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana

Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana merupakan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi pascabencana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses dan kegiatan rehabilitasi serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas teknis terkait;
2. Survei lapangan dalam perbaikan dan pemulihan daerah pasca bencana.
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kejadian pasca bencana.

Sasaran kegiatan ini adalah daerah yang terkena bencana dan memerlukan perbaikan dan pemulihan lingkungan dengan segera sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat khususnya yang terkena dampak bencana berdasarkan data kejadian yang masuk pada BPBD dalam kurun 1 tahun berdasarkan data Kejadian / bencana dengan melakukan terlebih dahulu pemilahan data yang akan di monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan pada kegiatan ini untuk penanggulangan pasca bencana, dimana pelaksanaannya bersifat tentatif tergantung pada kejadian bencana, sehingga anggaran yang ada sebagai antisipasi untuk merehabilitasi lingkungan pasca bencana, manakala terjadi bencana di Kota Cimahi.

Untuk Tahun 2018, target sasaran yang telah di tetapkan tidak dapat terlaksana, karena tidak ada lingkungan pasca kejadian bencana yang harus di rehabilitasi.

6) Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana dan Peralatan yang Lebih Baik

Pelaksanaan Kegiatan berupa Sosialisasi Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana Dan Peralatan Yang Lebih Baik T.A 2018 dengan penyampaian informasi mengenai Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana dan Peralatan Yang Lebih Baik bagi masyarakat di wilayah Kota Cimahi. Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan di Aula Gd. A Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada tanggal 8 Agustus 2018.

Peserta terdiri dari profesi di bidang bangunan dari tingkat kelurahan, Kecamatan, Lembaga Perbadayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kecamatan dan Kelurahan di kota Cimahi, relawan pb dengan jumlah peserta 100 orang.

Narasumber Yang Menyajikan Materi Pada Kesempatan Ini Dari Puslitbang Perumahan Dan Permukiman Kementerian PUPR RI, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Serta Dari Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.

Materi yang disampaikan pada acara sosialisasi disampaikan oleh para ahli yang kompeten di bidangnya dan para praktisi terkait struktur bangunan tahan bencana yang profesional adapun materi yang di sampaikan sebagai berikut :

- Rumah Tahan Gempa Konvensional dan RISHA
- Rumah dan Bangunan Tahan Gempa
- Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan

7) Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

Sub kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana terdiri dari kegiatan sbb :

1. Pelaksanaan Kajian Sumber Daya Dan Peralatan DI Kota Cimahi

Kajian Sumber Daya dan Peralatan Penanggulangan Bencana dibuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam menunjang perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mewujudkan tanggung jawab dan fungsi sebagai Badan yang bertugas melindungi masyarakat dari segala bentuk kemungkinan bencana yang muncul.

Pekerjaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi stakeholder terkait yang berkepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan manajemen penanggulangan bencana, agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan berhasil guna dalam penanggulangan bencana.

Tujuannya adalah terselenggaranya perencanaan manajemen penanggulangan bencana sehingga dapat terukur baik secara personil/sumber daya maupun peralatan yang tersedia di wilayah Kota Cimahi.

❖ Hasil dari Kajian Sumber Daya Dan Peralatan DI Kota Cimahi

- a. Dengan adanya Hasil Inventarisasi Sumber Daya dan Peralatan Penanggulangan Bencana, dapat disimpulkan bahwa:
 1. Sumber Daya di Kota Cimahi telah melampaui kebutuhan minimal untuk Penanggulangan Bencana.
 2. Kekurangan Peralatan Penunjang Penanggulangan Bencana dapat dilengkapi sesuai standar kebutuhan.
 3. Cakupan Kota Cimahi hanya sebagai kecil dari Wilayah Provinsi Jawa Barat, Standar Peralatan Penanggulangan BNPB merupakan Tingkatan Wilayah Provinsi sedangkan setingkat wilayah Kota/Kabupaten dalam Peraturan Pemerintah tidak disetarakan.

-
- b. Kekurangan Peralatan Persiapan Penanggulangan Bencana:
1. Mobil Komando 1 Unit, Penambahan Mobil Komando 1 Unit dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 2. Mobil Rescue 1 unit, Penambahan Mobil Rescue 1 Unit dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi
 3. Mobil Tangki BBM 1 Unit, Penambahan Mobil BBM 1 Unit dapat diinventariskan kepada Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
 4. Mesin Pompa Air 1 Unit, Penambahan Mesin Pompa Air 1 Unit dapat diinventariskan kepada Unit Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.
 5. Mesin Fogging 2 Unit, Penambahan mesin Fogging 2 Unit dapat diinventariskan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
 6. Mesin Chainsaw 8 Unit, Penambahan Chainsaw 8 unit dapat diinventariskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Bagian Pertamanan Kota Cimahi.
 7. Vertikal Rescue 1 Unit, Penambahan Vertikal Rescue 1 Unit dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi
 8. Hand Sprayer 2 Unit, Penambahan Hand Sprayer 2 Unit dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 9. Tenda Regu 26 Unit, Penambahan Tenda Regu 26 Unit dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 10. Tenda Posko Kesehatan 1 Unit, Penambahan Tenda Posko Kesehatan dapat diinventariskan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
 11. Mobil Water Treatment 1 Unit, Penambahan Mobil Water Treatment 1 unit dapat diinventariskan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

-
12. Mobile Toilet 1 Unit, Penambahan Mobile Toilet 1 Unit dapat diinventariskan kepada Dinas Sosial P2KBP3A Kota Cimahi.
 13. Water Pillow 30 Unit, dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 14. Instalasi Penjernih Air 1 Unit, dapat diinventariskan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
 15. Velbet 29 Unit, dapat diinventariskan kepada Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
 16. Dapur Umum 1 Unit, dapat diinventariskan kepada Dinas Sosial P2KBP3A Kota Cimahi.
 17. Megaphone 1 Unit, dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 18. Jaws of life 1 Unit, dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 19. Life Detector 1 Unit, dapat diinventariskan kepada BPBD Kota Cimahi.
 20. Excavator/Beko, 1 Unit, Unit dapat diinventariskan kepada Dinas PUPR Kota Cimahi.

Semua Kendaraan dan Peralatan mempunyai masa pakai efektif, jika barang tersebut sudah sudah mencapai masa pakai 5 (Lima) tahun sebaiknya diperbaharui

- c. Adapun saran untuk penanggulangan Bencana berdasarkan Sumber Daya dan Peralatan:
 1. Diperlukannya suatu Manajemen tindakan Operasional Penanggulangan Bencana, yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD Kota Cimahi.
 2. Diadakannya suatu rumusan cara Penanggulangan diantara OPD terkait dikarenakan masih awamnya persiapan Penanggulangan Bencana yang akan terjadi.

-
3. Ditempatkannya Posko Bencana/Kantor BPBD yang strategis, sehingga jika terjadi Bencana dapat ditangani secara cepat.
 4. Pengadaan Peralatan Peringatan Dini, baik alat Pengukur Gempa maupun alat Pengamat Debit Curah Hujan.
 5. Pengoptimalan Sumber Air untuk Pemadam kebakaran Kota Cimahi (Hydrant) dengan koordinasi pihak terkait.
 6. Dilakukannya Gladi Lapangan/Latihan dengan OPD terkait jika terjadi Bencana.
 7. Penyediaan Dana Talangan Siaga Bencana di luar mata anggaran Rutin tahunan.

2. Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

Kegiatan Kontijensi Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana dilaksanakan di Puri Setiabudhi Jl. DR. Setiabudhi No.378, Ledeng, Cidadap, Kota Bandung pada tanggal 27 s/d 30 November 2018. Jumlah peserta hadir berjumlah 35 orang yang terdiri dari Instansi Vertikal, SOPD dan FPRB Kota Ciamhi dan ditambah dengan panitia dengan rincian peserta sebagai berikut.

Rencana kontijensi merupakan pembagian tugas dan peran yang harus dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak (stakeholder) dan multi sektor yang terlibat dan berperan dalam penanganan bencana, termasuk dari pemerintah SOPD, TNI, POLRI, BASARNAS (sektor-sektor) yang terkait, perusahaan negara, swasta, organisasi non pemerintah lembaga masyarakat, serta pihak-pihak yang lain yang terkait. Adapun pelaksanaan penyusunan rencana kontijensi ini difokuskan pada satu jenis bencana saja yaitu Gempa Bumi.

8) Kajian Mitigasi Kebencanaan

Pelaksanaan Kegiatan terdiri Kajian Mitigasi Bencana terdiri dari Sub Kegiatan sbb :

1. Penyusunan Dokumen Kajian Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi dalam hal ini melakukan upaya mitigasi dengan kegiatan kajian mitigasi bencana yaitu:

1. Melakukan kajian mitigasi banjir yang menjadi isue nasional yaitu banjir di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan sehingga diharapkan dengan hasil kajian tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam mengatasi/mengurangi dampak banjir yang selama ini ditimbulkan.
2. Melakukan sosialisasi dan simulasi dalam menghadapi potensi bencana yang menjadi ancaman di Kota Cimahi.

Kajian Mitigasi Banjir dibuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam menunjang perencanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dalam mewujudkan tanggung jawab dan fungsi sebagai Badan yang bertugas melindungi masyarakat dari segala bentuk kemungkinan bencana yang muncul.

➤ Hasil Kajian Mitigasi Banjir di Kelurahan Melong

Berdasarkan hasil survey lapangan, sementara Permasalahan Banjir di RW-02 Kelurahan Melong, diakibatkan oleh :

1. Banjir diakibatkan ketinggian permukaan sungai melebihi daerah permukiman warga.
2. Luapan sungai terjadi akibat pertemuan Aliran Sungai dari 3 aliran sungai kecil.
3. Jika terjadi hujan besar luapan Sungai limpas ke muka jalan dan mengalir ke permukiman warga.

4. Air Sungai merupakan Saluran Drainase yang bersumber dari 3 Wilayah Daerah (Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Bandung).
5. Area pemukiman warga RW-02 Kel. Melong, pada posisi lebih rendah dari muka jalan.
6. Banjir tidak hanya tertuju pada RW-02 Melong saja, tetapi juga menyebar hingga daerah Perbatasan Kota Bandung dan Kota Cimahi (Gempol Asri), dan daerah perbatasan Kab. Bandung Barat (Kompleks perumahan Marga Asih).
7. Luapan air sungai masuk hingga badan tol (KM.130)
8. Sumber banjir diakibatkan :
 - a. Hujan didaerah permukaan yang lebih tinggi daripada RW 02 Kel. Melong;
 - b. Buangan sampah warga;
 - c. Kurang tingginya dinding penahan saluran;
 - d. Pendangkalan sungai akibat adanya sedimentasi sungai (lumpur dan limbah batubara/*fly-ash*);
 - e. Tidak terpeliharanya aliran sungai;
 - f. Penyempitan Sungai (Lebar sungai tidak merata).

Gambar 1. Survey Pengukuran di Lapangan

➤ Pemecahan Masalah Banjir di Kelurahan Melong

Cara Penanggulangan Masalah Banjir di Kelurahan Melong, terlebih kepada warga RW-02, untuk menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Cimahi, hal ini terkait dengan penyediaan Anggaran jangka panjang dan jangka pendek sebagai pendukung Mitigasi Banjir. Adapun penanggulangan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

✓ **Penanggulangan Banjir Dalam Jangka Waktu Dekat**

Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam waktu dekat, agar dilakukan sesegera mungkin untuk penanggulangan masalah Banjir. Langkah-langkah tersebut yaitu :

- a. Peninggian Dinding saluran sungai sepanjang jalan Sukahaji, agar Debit air sewaktu hujan tidak limpas ke jalan.
- b. Normalisasi Sungai (Pengerukan kembali dasar sungai akibat sedimentasi).
- c. Pengadaan Pompa Sumpit, antisipasi jika banjir menggenangi RT.02/RW.02 Kel. Melong (dibangun pada lokasi paling rendah).



Gambar Program Penanggulangan Banjir Kel. Melong Cimahi

➤ Upaya Penanggulangan Bencana Banjir

Upaya Penanggulangan Bencana Banjir sebenarnya bisa dilakukan sejak dini, hal ini dapat diantisipasi dengan diadakan Penyuluhan dan Penjelasan kepada Kesadaran warga di mulai tingkat Rukun warga/RW hingga Kecamatan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Bencana Banjir antara lain :

a) PENANGGULANGAN BANJIR PADA TAHAP AWAL

1. **Tidak membuang sampah sembarangan**, Salah satu penyebab banjir yang sering kita temui adalah sampah. Saluran air yang seharusnya berfungsi hanya untuk mengalirkan air akan terhambat dengan adanya tumpukan sampah.
2. **Melakukan penghijauan**, Penghijauan adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya banjir. Akar-akar pohon memiliki kemampuan untuk menyerap air dengan efektif dan dapat difungsikan sebagai tampungan air tanah.
3. **Tidak menebangi hutan secara liar**, Hutan yang kaya akan pohon dapat menyerap air melalui akar-akarnya. Selain itu pohon akan memproduksi oksigen melalui fotosintesis. Maka dari itulah kita bisa melakukan penghijauan dimulai dari kita sendiri, misalnya dengan menanam pohon di sekitar rumah kita supaya lebih sejuk dan tidak banjir.
4. **Mengatur tata kota yang baik**, Pengaturan tentang tata kota yang baik. Tata kota yang baik memiliki green open space atau tempat terbuka hijau. Tata kota yang baik juga meliputi saluran penggunaan air serta sistem drainase yang baik yang tidak akan meluap karena banjir.
5. **Membuat sistem drainase yang baik**, Menjaga dan memelihara kebersihan sistem drainase atau pengairan yang baik adalah satu hal yang sangat memegang peranan dalam kaitannya dengan pencegahan banjir. Drainase adalah sistem pengairan berserta

tata kelola air ketika turun hujan. Sistem drainase juga termasuk jalannya air sehingga tidak menggenang apalagi meluap secara tiba-tiba menjadi air bah.

6. Mengatur keluarnya debit air, Pembuatan Pintu Air adalah cara untuk mengatur keluarnya debit air juga merupakan salah satu cara untuk mencegah banjir bandang. Ketika hujan turun dengan deras, Pengendalian air dengan adanya pintu air sungai supaya tidak terjadi luapan yang pada akhirnya bisa mengenai daerah-daerah di sekitar.

7. Membuat Sumur Resapan, Membuat Sumur Resapan air bawah tanah juga sangat diperlukan untuk membantu penyerapan air Tanah. Penyerapan air bawah tanah akan membantu saluran air secara dini sehingga tidak menggenang dan menjadi penyebab banjir.

8. Membuat lubang biopori, Lubang biopori juga merupakan hal yang perlu diperhatikan karena bisa mencegah terjadinya banjir. Lubang biopori adalah lubang ditanah dengan kedalaman tertentu dan diisi oleh tumbuh-tumbuhan (sampah daun). Kita bisa menggunakan cacing tanah sebagai alat pancingan. Cacing tanah tersebut akan membuat lubang-lubang pada tanah sehingga membantu peresapan air.

b) PENANGGULANGAN BANJIR PADA TAHAP KESIAPSIAGAAN

Beberapa upaya penanggulangan banjir yang perlu dilakukan pada tahap kesiapsiagaan adalah berikut sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan masyarakat untuk membahas evaluasi banjir yang pernah terjadi dan melakukan perencanaan untuk menghadapi banjir yang mungkin akan datang. Kegiatan ini bisa dilakukan pada saat menjelang musin hujan.

-
2. **Memberdayakan masyarakat** dengan menyatukan semua sumberdaya masyarakat yang dapat diatur oleh organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.
 3. **Memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat** akan penyebab banjir dan dampaknya.
 4. **Kampanye keterlibatan masyarakat dan pertolongan diri sendiri.** Tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat agar siap siaga dan memahami apa yang harus dilakukan pada saat sebelum, ketika dan setelah banjir.
 5. **Membuat sistem peringatan dini.** Sistem peringatan dapat mengacu pada standar level peringatan seperti siaga I, Siaga II, Siaga II, AWAS dan lain sebagainya. Sistem peringatan dini dapat berupa sirine, pengeras suara atau kentongan.
 6. **Pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat.** Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai bencana banjir, dampak yang ditimbulkan dan bagaimana harus bersikap dalam menghadapi bahaya banjir.
 7. **Menyiapkan tempat pengungsian.** Tempat ini merupakan tempat yang diperkirakan aman dari banjir dan mampu menampung masyarakat yang akan mengungsi bila banjir terjadi.
 8. **Menyiapkan proses pengungsian.** Ketika nantinya banjir benar-benar terjadi, proses evakuasi ke pengungsian akan menjadi lebih mudah apabila telah dipersiapkan sebelumnya. Kesiapan ini dapat berupa pembuatan dan menandai jalur evakuasi, melakukan simulasi evakuasi, dan membentuk tim pencarian dan evakuasi.

c) **PENANGGULANGAN BANJIR PADA TAHAP SEBELUM BANJIR TERJADI**

Ketika banjir benar-benar terjadi maka perlu tindakan yang harus segera dilakukan. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda yang dimiliki. Upaya yang perlu dilakukan ketika banjir terjadi adalah berikut ini.

1. **Badan koordinasi yang baik**, Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari pihak masyarakat ataupun pemerintah. Pihak-pihak tersebut adalah kelurahan, institusi pemerintahan dan organisasi lain seperti PMI dan SAR.
2. **Pencarian dan penyelamatan**, Melakukan pencarian dan penyelamatan untuk warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pencarian dan penyelamatan ini dilakukan oleh tim seperti regu SAR.
3. **Pendataan dan logistik**, Pendataan terhadap korban perlu dilakukan untuk mengetahui siapa saja yang selamat dan yang belum. Pendataan lainnya perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan logistik, tempat pengungsian, tenaga medis dan bantuan diperlukan.
4. **Mengungsi**, Mengungsi merupakan tindakan penyelamatan dengan cara berpindah ketempat yang aman dari bencana. Prioritas utama dalam mengungsi adalah ibu hamil, anak-anak dan manula.
5. **Melindungi daerah pemukiman**, Selama banjir berlangsung dan masyarakat pergi meninggalkan tempat pemukiman maka sangat penting untuk membangun sebuah kelompok dari masyarakat yang bertugas untuk melindungi daerah pemukiman setelah ditinggal mengungsi.

2. Sosialisasi Dan Simulasi Bencana

Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan dengan permintaan dari lembaga/instansi sebagai bentuk respon terhadap potensi bencana yang mengancam wilayah kota cimahi sehingga perlu peningkatan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Pelaksanaan sosialisasi dan simulasi bencana sebagai upaya mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi terhadap masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman secara mandiri dalam menghadapi bencana.

5. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial

Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp. 493.990.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 148.851.134,00 atau 30,13%. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana

Untuk lebih jelasnya dari uraian realisasi triwulan IV, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator	Tolak Ukur	Kinerja	
		Target	Realisasi
Masukan	Jumlah dana	493.990.000,00	493.990.000,00
Keluaran	Terlaksananya fasilitasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	30 Rumah	10 Rumah
Hasil	Terlaksananya fasilitasi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam/sosial	100 %	100%

Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana merupakan kegiatan memberikan bantuan secara stimulan kepada warga masyarakat di wilayah Kota Cimahi yang rumahnya rusak akibat bencana, dengan harapan terwujudnya kembali pelaksanaan pembangunan rehabilitasi rumah sehingga dapat layak huni. Pemberian bantuan stimulan berupa bahan material bangunan dan upah pekerja dalam upaya memfasilitasi rehabilitasi rumah yang terdampak bencana.

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Rumah Akibat Bencana Alam pada pasca bencana dengan target kinerja sebanyak 30 (tiga puluh) rumah berdasarkan prosentasi derajat kerusakan bangunan dengan kategori berat (71% s.d.100 %) kategori sedang (31% s.d 70%) dan kategori ringan (0% s.d 30 %).

Data Kejadian yang masuk pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi pada tahun 2018 mencapai $\pm$ 150 titik dengan berbagai jenis kejadian alam maupun non Alam. Berdasarkan data diatas sebagai tindak lanjut pada pasca bencana seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah memberikan bantuan stimulan pada masyarakat terdampak berdasarkan jenis kerusakan mulai dari tingkatan katagori ringan sampai katagori kerusakan berat hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca bencana yang terjadi diwilayah Kota Cimahi.

Tabel 2.6
Hasil Verifikasi
Jumlah Aset permukiman warga dengan berdasarkan katagori kerusakan Akibat
Bencana di Kota Cimahi Tahun 2018

No	Katagori Kerusakan	Jumlah
1	Ringan	4
2	Sedang	3
3	Berat	3
	Total Keseluruhan	10

Kegiatan ini telah dilaksanakan berupa bantuan stimulan rehabilitasi rumah akibat bencana pada korban terdampak berdasarkan kejadian bencana Alam dan telah teralisasi sebanyak 10 (sepuluh) artinya berdasarkan hasil assesment/kaji cepat oleh tim teknis seluruh korban bencana yang membutuhkan bantuan 100% telah mendapat bantuan.

Berikut tabel mengenai rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d Tahun 2018 Kota Cimahi disajikan pada tabel. T.C.1 Berikut ini

Tabel T-C.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD Tahun 2019 Kota Cimahi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPBD Tahun 2017-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s.d. Tahun 2020	
		Indikator Kinerja Tahun 2019-2022	Target Kinerja 2019-2022		Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA									
	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana	50 Rumah	12 Bulan	30 Rumah	10 Rumah	33%	40 Rumah	50 Rumah	100%
	Kontigensi penyusunan rencana darurat operasi	Standar Operasional Prosedur	4 SOP	-	1 SOP	2 SOP	200%	-	2 SOP	50%
	Mitigasi Bencana	Dokumen kajian	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50%
	Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparaturnya dan relawan	Jumlah aparaturnya dan relawan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
	Pelatihan penaksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam	Jumlah aparaturnya yang mengikuti pelatihan	250 Orang	-	50 Orang	-	0	50 Orang	50 Orang	100%
	Pelatihan penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih baik	Jumlah Relawan dari 15 Kelurahan	600 Orang	1 kali sosialisasi kegiatan penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan lebih baik	100 Orang	100 Orang	100%	-	100 Orang	17%
	Pelatihan pengelolaan data dan informasi kejadian bencana	Jumlah Relawan dan aparaturnya	380 Orang	-	70 Orang	-	0	70 Orang	0	18%
	Pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana	Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran)	30 Titik	-	6 Titik	-	0	8 Titik	8 Titik	27%
	Pelatihan Trauma Healing bagi korban bencana alam	Jumlah Relawan dan aparaturnya	300 Orang	-	60 Orang	-	0	60 Orang	-	0%
	Pemantauan dan Penyebarluasan Potensi Bencana	Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau	15 Kelurahan	-	15 Kelurahan	15 Kelurahan	100%	15 Kelurahan	15 Kelurahan	100%
		Jumlah lokasi simulasi tanggap darurat bencana (HKBN)						1 Lokasi	1 Lokasi	
		Jumlah SOP Keselamatan dan Keamanan Gedung						1 SOP	1 SOP	
		Jumlah Paket Rambu-Rambu Jakur Evakuasi Bencana						1 Paket	1 Paket	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPBD Tahun 2017-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Taun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s.d. Tahun 2020	
		Indikator Kinerja Tahun 2019-2022	Target Kinerja 2019-2022		Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan logistik bagi korban bencana	jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan	440 Kejadian	3 paket, 13 jenis, 1 unit, 4 kali, 7 orang	4 Paket	2 Paket	50%	90 Kejadian	90 Kejadian	20%
	Pengembangan aplikasi IT komunikasi dan kehumasan tanggap bencana	Sistem aplikasi kebencanaan	3 Aplikasi	-	2 Aplikasi	-	0	-	-	0%
	Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana	Jumlah pelatihan	20 Orang	3 kegiatan, 15 orang, 7 orang, 3 kegiatan, 7 jenis	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
		Jumlah paket perlengkapan tanggap darurat bencana	4 Paket		1 Paket	1 Paket		1 Paket	2 Paket	50%
	Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana	Jumlah lingkungan yang revitalisasi	3 Lingkungan	1 Tahun	3 Kecamatan	0 Kecamatan	0%	3 Lingkungan	3 Lingkungan	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA									
	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina	23 Orang	-	-	-	-	23 Orang	23 Orang	100%
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
	Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang	8 Dokumen	-	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan keuangan	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen movev	7 Dokumen	4 kali rapat monitoring, evaluasi dan 1 THL	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
					1 Orang	1 Orang	100%			
					4 Kali	4 Kali	100%			
	Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah dokumen RENSTRA	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%
		Jumlah Pelaksanaan FGD	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1%
	Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD	Jumlah SOP	14 SOP	-	-	-	-	14 SOP	14 SOP	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPBD Tahun 2017-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s.d. Tahun 2020	
		Indikator Kinerja Tahun 2019-2022	Target Kinerja 2019-2022		Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
	Koordinasi dan konsultasi kedinasan	jumlah perjalanan dinas	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pemeliharaan rumah dan gedung dinas	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas	12 Bulan	12 Bulan	1 Kali	1 Kali	0%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar	19 Unit	12 Bulan	5 Unit	5 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	26%
		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	19 Unit					19 Unit	19 Unit	26%
		Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19 Unit					19 Unit	19 Unit	26%
		Jumlah Pengadaan Kendaraan	19 Unit					19 Unit	19 Unit	0%
	Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor	12 Bulan	-	4 Kali	4 Kali	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	13 Paket					3 Paket	3 Paket	100%
	Pengadaan mebeleur	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor	4 Paket					1 Paket	1 Paket	100%
	Pengadaan seragam pegawai	Jumlah Set Seragam Pegawai	3 Paket					3 Paket	3 Paket	100%
	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Luas Lahan yang dikuasai	2567 m2					2567 m2	2567 m2	0%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan gudang kantor	Jumlah Gudang dan Kantor	2 Unit	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	2 Unit	2 Unit	100%
	Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah Bulan THL yang di asuransikan	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPBD Tahun 2017-2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Taun Lalu (2018)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPBD s.d. Tahun 2020	
		Indikator Kinerja Tahun 2019-2022	Target Kinerja 2019-2022		Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah Bulan Jasa Air	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Bulan Jasa Komunikasi	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	
		Jumlah Bulan Jasa Listrik	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penggandaan	12 Bulan	100%	1 Paket	1 Paket	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi	12 Bulan		4 Surat Kabar	4 Surat Kabar	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Jenis Cetakan	1 Paket					1 Paket	1 Paket	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga	21 Set					5 Set	5 Set	42%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kota Cimahi

BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan yang terdiri dari fase pra bencana/fase tidak terjadi bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pelayanan penanggulangan bencana di Kota Cimahi belum ditetapkan dalam suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator Kinerja yang dimuat pada dokumen Renstra BPBD Tahun 2017-2022 belum sesuai dengan SPM karena Indikator Kinerja telah ditetapkan sebelum SPM terbit. (Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, tanggal 29 Oktober 2018) Oleh karena itu, analisis kinerja pelayanan penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Cimahi mengacu pada indikator sasaran yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Terdapat 1 (satu) sasaran pelayanan penanggulangan bencana yang tercantum dalam RPJMD tersebut Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi berada di misi 4 Wali Kota terpilih yaitu : *Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan*. Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas, Tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk pada program prioritas No. 2 yaitu : *Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan*.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat bencana maupun sesudah kejadian bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana alam, seperti longsor, banjir dan gempa bumi, bahkan menjadi salah satu Kota yang memiliki tingkat risiko bencana yang cukup tinggi berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) 2013 dengan skor 120 yaitu

pada skala kerawanan Sedang. Tingkat resiko ini dapat meningkat, apabila kondisi klimatologi, topografi dan geohidrologi dipengaruhi oleh cuaca ekstrim, serta penggunaan lahan dan pengembangan wilayah yang tidak berpihak pada pengurangan resiko bencana di Wilayah Kota Cimahi.

Kondisi tersebut tentunya harus menjadi perhatian bersama stakeholder, agar upaya penanggulangan bencana di Wilayah Kota Cimahi, tidak hanya sekedar penanggulangan darurat saat kejadian bencana, namun bagaimana upaya pengurangan resiko dapat menjadi panduan dalam menekan angka kejadian bencana alam maupun non alam secara tepat sasaran.

BPBD Kota Cimahi sebagai lembaga teknis penanggulangan bencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek penanggulangan bencana kota yang professional, mampu menyusun perencanaan dan standar operasi tindakan yang dapat mengakomodasi berbagai standar operasional yang dimiliki oleh unit kerja lain dalam melaksanakan penanganan kejadian bencana, serta mampu mengakomodasi perkembangan yang terjadi diwilayah Kota Cimahi, yang berakibat pada perubahan potensi – potensi bencana alam sebelumnya.

Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana secara implementatif dituangkan dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Adapun uraian tugas yang secara langsung dinyatakan untuk pelaksanaan tugas BPBD pada 3 (tiga) tahapan bencana, yaitu :

a. Tahap Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

Pasal 7 ayat (4) dengan focus sebagai berikut :

- (1) Menyusun program kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (2) Menyusun petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Pengolahan dan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan.
- (4) Fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (5) Koordinasi dengan unit terkait dalam hal pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (6) Pemetaan daerah rawan bencana.
- (7) Sosialisasi pencegahan bencana.
- (8) Penyusunan standarisasi dan prosedur tetap kebencanaan.

-
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan.

b. Tahap kedaruratan

- (1) Menyusun program kerja kedaruratan dan logistik.
- (2) Menyusun petunjuk teknis tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (3) Penyusunan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumberdaya dan logistik.
- (4) Menyusun bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana.
- (5) Melakukan koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana.
- (6) Melakukan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda.
- (7) Melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengurusan pengungsi.
- (8) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi logistik.
- (9) Melaksanakan pengerahan logistik.
- (10) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang bantuan bencana.
- (11) Memantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

c. Tahap Pasca Bencana :

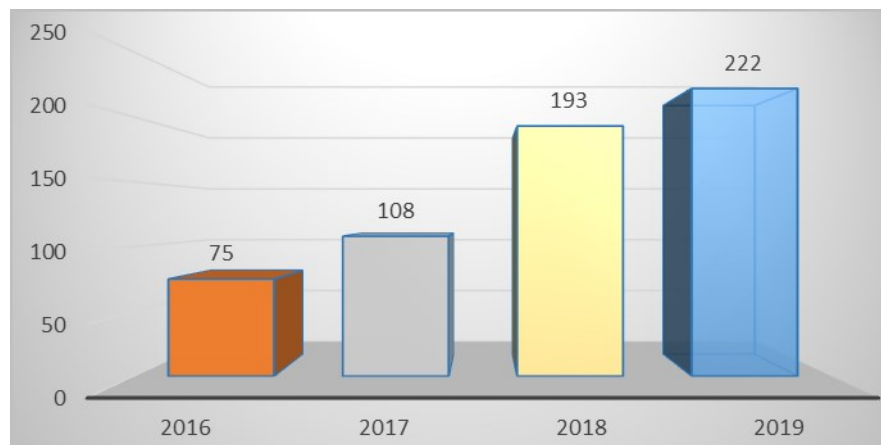
- (1) Menyusun program kerja rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Penyusun petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi saat pasca bencana.
- (3) Penyusunan bahan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (4) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (5) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

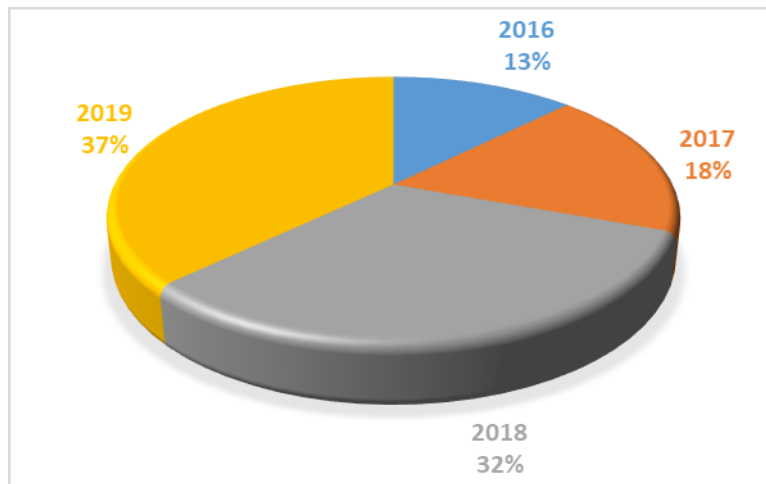
Pada perjalanannya, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2015 sampai dengan saat ini, BPBD Kota Cimahi belum didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya, baik aparatur, sarana prasarana, program dan kegiatan serta anggaran program dan kegiatan yang memadai.

Pengembangan – pengembangan pelaksanaan tugas atau kinerja operasional sampai dengan saat ini masih dilakukan secara parsial atau didasarkan pada kondisi yang ada, seperti jumlah personil yang masih sedikit, diimbangi dengan kualitas dan kuantitas kerja aparatur yang hanya dibatasi pada pelaksanaan kaji cepat untuk identifikasi kejadian dan kaji cepat untuk kebutuhan logistik. Sedangkan untuk pendistribusian logistik pun belum dapat dilakukan secara optimal karena tidak adanya kendaraan operasional.

Disisi lain, pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan serta bidang rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana belum optimal, mengingat perumusan kebijakan teknis berkenaan dengan kedua bidang tersebut belum ada secara formal sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas.

Kondisi saat ini tentunya tidak menjadi penghalang terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilayah Kota Cimahi, Berdasarkan rekapitulasi kejadian Bencana Tahun 2019 tercatat telah terjadi 134 kali kejadian yang tersebar di 222 lokasi kejadian. Jumlah ini meningkat dari 3 tahun sebelumnya dari tahun 2016 dengan 59 kali kejadian tersebar di 75 titik lokasi kejadian dan tahun 2017 dengan 86 kali kejadian tersebar di 108 titik lokasi kejadian, pada tahun 2018 berjumlah 151 kejadian bencana yang tersebar di 193 titik lokasi kejadian.





Pada grafik persentase kejadian diatas terlihat bahwa jumlah Peningkatan kejadian rata-rata 8 % pertahun dan kejadian 12 kali setiap bulannya dalam terhitung dari tahun 2016 – 2019. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. kurang lebih 222 kejadian atau kasus dapat ditangani oleh BPBD, baik dari sisi pelaksanaan kaji cepat identifikasi dan kaji cepat kebutuhan logistik, pengerahan logistik dengan menggunakan mobilitas yang ada, fasilitasi dan rehabilitasi rumah korban bencana, sampai dengan koordinasi dengan unit kerja terkait mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

Hal – hal lainnya yang menjadi permasalahan dan tantangan dalam menjalankan fungsi penanggulangan bencana, antara lain :

- Anggaran program kegiatan yang belum mengakomodasi kebutuhan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Belum optimalnya dokumen perencanaan strategis pada BPBD.
- Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun kinerja operasional di lingkup intern BPBD maupun unit kerja terkait lainnya.
- Personil yang masih terbatas, sehingga peran dan fungsi dilakukan terhadap tugas utama dan tugas tambahan yang ada di lingkup BPBD.
- Belum tersusunnya kinerja yang terukur bagi setiap jabatan, baik struktural maupun fungsional diinternal BPBD.

- f. Keterbatasan sarana prasarana seperti gedung perkantoran, gudang penyimpanan logistik dan peralatan, serta kendaraan operasional untuk dipergunakan pada setiap kondisi tahapan kebencanaan.
- g. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan.
- h. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dalam hal teknis penanggulangan bencana di lapangan.
- i. Belum adanya sistem informasi kebencanaan yang terintegrasi dengan data/informasi yang dikelola unit kerja lainnya.
- j. Masih kurangnya SDM yang memiliki integritas dalam manajemen penanggulangan bencana.

Melalui perencanaan yang matang di akhir Tahun Anggaran 2020, diharapkan terdapat peningkatan pada Tahun Anggaran 2021, diharapkan BPBD responsif, kreatif dan inovatif, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kedepan untuk meningkatkan profesionalisme pencegahan dan penanggulangan bencana demi terwujudnya Wilayah Kota Cimahi yang kondusif dan tanggap terhadap darurat bencana.

Berikut tabel mengenai rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d Tahun 2020 dimana pengukuran berdasarkan SK Walikota Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022 disajikan pada tabel. T.C.2 Berikut ini :

Tabel T-C.2														
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kota Cimahi														
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Resiko Bencana			120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	120 (Kelas Resiko Sedang)	-	-	
	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Wilayah Yang Siap Menghadapi Bencana		0%	20%	46,66%	73,33%	100%	0%	20%	46,66%	0%	0%	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Respon Tanggap Darurat		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Pemulihan Sarana dan Prasarana serta Lingkungan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Cimahi

Sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kota Cimahi, perlu menetapkan permasalahan yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program-program kegiatan. Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/ kegiatan, karena pada dasarnya program/ kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/ sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Secara umum permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kota Cimahi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kota Cimahi tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut secara umum adalah: Penguatan kelembagaan, rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dikarenakan keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
2. Relatif kecilnya alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi Penanggulangan Bencana, sehingga hal tersebut menghambat pada pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
3. Belum adanya Regulasi Penanggulangan Bencana yang menjadi dasar dari setiap Rencana proram kegiatan BPBD Kota Cimahi dalam upaya Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat Kota Cimahi;
4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan yang efektif antara BPBD dan SKPD lain sehingga upaya penanggulangan bencana bersifat parsial;
5. Keterbatasan aparatur dari segi jumlah dan kualitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dalam penanggulangan Bencana;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam penanggulangan bencana sehingga pelayanan ke masyarakat belum optimal;
7. Masih kurangnya dukungan masyarakat maupun dunia usaha dalam penanggulangan bencana;

-
8. Pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana masih dianggap kurang sehingga tingkat kesiapan serta kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana belum sepenuhnya terwujud, hal ini menimbulkan kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang berdampak pada kemungkinan korban bencana yang cukup besar;
 9. Belum adanya koordinasi yang efektif baik antar unit/institusi Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya seperti badan usaha swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media massa dan masyarakat.
 10. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;

1 Sementara beberapa peluang dalam meningkatkan pelayanan BPBD Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah non departemen yang menjadi komando dan koordinator penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional serta menjadi mitra kerja bagi BPBD Kota Cimahi sehingga pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. Adanya dukungan dana dari Pemerintah Kota Cimahi melalui APBD dan pemerintah pusat melalui BNPB;
- c. Ditetapkannya ancaman dan penanggulangan bencana sebagai salah satu isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
- d. Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM dalam upaya penanggulangan bencana;
- e. Perkembangan teknologi yang cukup pesat untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana, sehingga diharapkan pelayanan penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif;

-
- f. Adanya kearifan lokal yang relatif kuat dari masyarakat Kota Cimahi seperti nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana;

Isu strategis berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kota Cimahi pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, yang merupakan rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun direncanakan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan:

1. Kondisi wilayah Kota Cimahi yang rawan bencana. Berdasarkan hasil analisis BNPB yang tertuang dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, Kota Cimahi masuk dalam kategori sedang di beberapa indeks risiko bencana. Kelas risiko dengan sedang tersebut adalah indeks risiko bencana Banjir, Gempa bumi, Kebakaran, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Longsor, Gunung api, Gagal Teknologi, Konflik Sosial, Epidemi dan Wabah Penyakit;
2. Sasar lembang dan Gunung Tangkuban Perahu merupakan risiko bencana terdekat yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat yang berdampak besar kepada Kota Cimahi kedepannya baik secara korban jiwa maupun kerusakan yang diakibatkannya. Kejadian yang mungkin terjadi berupa gempa bumi dan letusan gunung Tangkuban Perahu.
3. Peningkatan angka kejadian akan selalu bertambah disebabkan jumlah penduduk yang meningkat, kawasan pemukiman yang meluas yang di bangun tanpa melihat kontur lahan dan kontruksi bangunan, alam yang mulai berubah serta faktor-faktor lain yang memicu peningkatan kejadian bencana.
4. Pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi setiap gejala-gejala serta perubahan alam yang mengidentifikasikannya kejadian suatu bencana akan terjadi, mutlak diperlukan untuk meningkat respon masyarakat dalam menyelamatkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat serta harta benda yang mungkin untuk diselamatkan. Tujuannya system ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian harta benda. Saat ini Indonesia hanya memiliki system deteksi tsunami.
5. Perubahan paradigma dalam dari responsive menjadi preventive merupakan tolak ukur yang baru dalam upaya penanggulangan bencana, hal ini bertujuan untuk

mencegah terjadinya bencana masih lebih baik dibandingkan menanggulangi bencana. Secara aspek ekonomis mencegah lebih ekonomis dibandingkan menanggulangi.

6. Kewajiban Negara dalam upaya melindungi korban terdampak bencana merupakan salah satu tugas dari BPBD, Pulihnya korban dan lingkungan terdampak bencana merupakan salah satu indikator utama suksesnya upaya penanggulangan bencana.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 BPBD Kota cimahi yang disajikan dalam Tabel T-C.3 berikut ini :

Tabel T-C.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Badan Penanggulangan Bencana Kota Cimahi

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Kota Cimahi	(1)Jumlah ASN yang dibina;	(1)23 Orang;	500.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	Kota Cimahi	(1)Jumlah ASN yang dibina;	(1)23 Orang;	500.000.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Kota Cimahi	(1)Jumlah Dokumen Anggaran;	(1)4 Dokumen;	200.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Kota Cimahi	(1)Jumlah Dokumen Anggaran;	(1)4 Dokumen;	200.000.000	
		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Kota Cimahi	(1)Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang;	(1)8 Dokumen;	150.000.000		PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	Kota Cimahi	(1)Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang;	(1)8 Dokumen;	150.000.000	
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Dokumen Laporan keuangan;	(1)4 Dokumen;	350.000.000		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Dokumen Laporan keuangan;	(1)4 Dokumen;	350.000.000	
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Kota Cimahi	(1)Jumlah dokumen monev;	(1)7 Dokumen;	300.000.000		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Kota Cimahi	(1)Jumlah dokumen monev;	(1)7 Dokumen;	300.000.000	
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Kota Cimahi	(1)Jumlah dokumen RENJA; (2)Jumlah dokumen RENSTRA;	(1)1 Dokumen; (2)0 Dokumen;	300.000.000		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Kota Cimahi	(1)Jumlah dokumen RENJA; (2)Jumlah dokumen RENSTRA;	(1)1 Dokumen; (2)0 Dokumen;	300.000.000	
		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Kota Cimahi	(1)Jumlah SOP;	(1)14 SOP;	50.000.000		PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	Kota Cimahi	(1)Jumlah SOP;	(1)14 SOP;	50.000.000	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah perjalanan dinas;	(1)12 Bulan;	280.000.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah perjalanan dinas;	(1)12 Bulan;	280.000.000	
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas;	(1)12 Bulan;	132.626.000		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas;	(1)12 Bulan;	132.626.000	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Kota Cimahi	(1)Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar; (2)Jumlah Kendaraan yang dipelihara; (3)Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; (4)Jumlah Pengadaan Kendaraan;	(1)19 Unit; (2)19 Unit; (3)19 Unit; (4)19 Unit;	1.476.300.000		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Kota Cimahi	(1)Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar; (2)Jumlah Kendaraan yang dipelihara; (3)Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; (4)Jumlah Pengadaan Kendaraan;	(1)19 Unit; (2)19 Unit; (3)19 Unit; (4)19 Unit;	1.476.300.000	
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor; (2)Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor;	(1)12 Bulan; (2)3 Paket;	250.000.000		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor; (2)Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor;	(1)12 Bulan; (2)3 Paket;	250.000.000	
		PENGADAAN MEBELEUR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor; (2)Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor;	(1)12 Bulan; (2)1 Paket;	200.000.000		PENGADAAN MEBELEUR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor; (2)Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor;	(1)12 Bulan; (2)1 Paket;	200.000.000	
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	Kota Cimahi	(1)Jumlah Set Seragam Pegawai;	(1)3 Paket;	300.000.000		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	Kota Cimahi	(1)Jumlah Set Seragam Pegawai;	(1)3 Paket;	300.000.000	
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Penyediaan ATK;	(1)12 Bulan;	38.200.960		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Penyediaan ATK;	(1)12 Bulan;	38.200.960	
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Gudang dan Kantor;	(1)2 Unit;	250.000.000		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Gudang dan Kantor;	(1)2 Unit;	250.000.000	
		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan THL yang di asuransikan;	(1)12 Bulan;	120.000.000		PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan THL yang di asuransikan;	(1)12 Bulan;	120.000.000	
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor;	(1)12 Bulan;	75.980.000		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor;	(1)12 Bulan;	75.980.000	
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Jasa Air; (2)Jumlah Bulan Jasa Komunikasi; (3)Jumlah Bulan Jasa Listrik;	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)12 Bulan;	44.400.000		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Jasa Air; (2)Jumlah Bulan Jasa Komunikasi; (3)Jumlah Bulan Jasa Listrik;	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)12 Bulan;	44.400.000	
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman;	(1)12 Bulan;	60.000.000		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman;	(1)12 Bulan;	60.000.000	
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Penggandaan; (2)Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi; (3)Jumlah Jenis Cetakan;	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)1 Paket;	68.500.000		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah Bulan Penggandaan; (2)Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi; (3)Jumlah Jenis Cetakan;	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)1 Paket;	68.500.000	
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Kota Cimahi	(1)Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga;	(1)5 Set;	50.000.000		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Kota Cimahi	(1)Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga;	(1)5 Set;	50.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	Kota Cimahi	(1)Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana;	(1)50 Rumah;	600.000.000	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	Kota Cimahi	(1)Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana;	(1)50 Rumah;	600.000.000	
		MITIGASI BENCANA	Kota Cimahi	(1)Dokumen kajian;	(1)0 Dokumen;	350.000.000		MITIGASI BENCANA	Kota Cimahi	(1)Dokumen kajian;	(1)0 Dokumen;	350.000.000	
		PELATIHAN DASAR KEBENCANAAN BAGI APARATUR DAN RELAWAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah aparatur dan relawan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan;	(1)50 Orang;	250.000.000		PELATIHAN DASAR KEBENCANAAN BAGI APARATUR DAN RELAWAN	Kota Cimahi	(1)Jumlah aparatur dan relawan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan;	(1)50 Orang;	250.000.000	
		PELATIHAN PENANKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM	Kota Cimahi	(1)Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan;	(1)50 Orang;	232.000.000		PELATIHAN PENANKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM	Kota Cimahi	(1)Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan;	(1)50 Orang;	232.000.000	
		PELATIHAN PENERAPAN RANCANG BANGUN TAHAN BENCANA DAN PERALATAN YANG LEBIH BAIK	Kota Cimahi	(1)Jumlah Relawan dari 15 Kelurahan;	(1)100 Orang;	100.000.000		PELATIHAN PENERAPAN RANCANG BANGUN TAHAN BENCANA DAN PERALATAN YANG LEBIH BAIK	Kota Cimahi	(1)Jumlah Relawan dari 15 Kelurahan;	(1)100 Orang;	100.000.000	
		PELATIHAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah Relawan dan aparatur;	(1)70 Orang;	107.000.000		PELATIHAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah Relawan dan aparatur;	(1)70 Orang;	107.000.000	
		PELATIHAN SIMULASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran);	(1)8 Titik;	200.000.000		PELATIHAN SIMULASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran);	(1)8 Titik;	200.000.000	
		PELATIHAN TRAUMA HEALING BAGI KORBAN BENCANA ALAM	Kota Cimahi	(1)Jumlah Relawan dan aparatur;	(1)60 Orang;	150.000.000		PELATIHAN TRAUMA HEALING BAGI KORBAN BENCANA ALAM	Kota Cimahi	(1)Jumlah Relawan dan aparatur;	(1)60 Orang;	150.000.000	
		PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN POTENSI BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau;	(1)15 Kelurahan;	300.000.000		PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN POTENSI BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau;	(1)15 Kelurahan;	300.000.000	
		PENGELOLAAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang	(1)90 Kejadian;	200.000.000		PENGELOLAAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang	(1)90 Kejadian;	200.000.000	
		PENGEMBANGAN APLIKASI IT KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN TANGGAP BENCANA	Kota Cimahi	(1)Sistem aplikasi kebencanaan;	(1)Maintenance Aplikasi;	90.608.874		PENGEMBANGAN APLIKASI IT KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN TANGGAP BENCANA	Kota Cimahi	(1)Sistem aplikasi kebencanaan;	(1)Maintenance Aplikasi;	90.608.874	
		PENINGKATAN KAPASITAS TANGGAP DARURAT BENCANA	Kota Cimahi	(1) Jumlah pelatihan ; (2)Jumlah paket perlengkapan tanggap darurat bencana;	(1)20 Orang; (2)1 Paket;	325.000.000		PENINGKATAN KAPASITAS TANGGAP DARURAT BENCANA	Kota Cimahi	(1) Jumlah pelatihan ; (2)Jumlah paket perlengkapan tanggap darurat bencana;	(1)20 Orang; (2)1 Paket;	325.000.000	
		PERBAIKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah lingkungan yang revitalisasi;	(1)3 Lingkungan;	250.000.000		PERBAIKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA	Kota Cimahi	(1)Jumlah lingkungan yang revitalisasi;	(1)3 Lingkungan;	250.000.000	
JUMLAH						8.350.615.841	JUMLAH						8.350.615.841

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPBD memperoleh usulan program dan kegiatan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang tingkat kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan dan Musrenbang tingkat Kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah yang langsung ditujukan kepada BPBD Kota Cimahi yaitu Pelatihan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat (SIBAT) yang diusulkan oleh 1 kecamatan yaitu Kecamatan Cimahi Selatan. Usulan tersebut sangat penting sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan serta kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana belum sepenuhnya terwujud.

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2019 disajikan pada tabel T.C.4 berikut ini

Tabel. T-C.4					
USULAN KELOMPOK MUSRENBANG KECAMATAN					
BIDANG SOSIAL BUDAYA					
KOTA CIMAHİ TAHUN 2019					
No.	Kelompok Kegiatan	Kecamatan	Swadaya	APBD	Bidang
1	Beasiswa siswa miskin	Cimahi Selatan	2.250.000	19.245.000.000	Sosial Budaya
2	Beasiswa siswa miskin	Cimahi Tengah	3.243.000.000	25.047.000.000	Sosial Budaya
3	Beasiswa siswa miskin	Cimahi Utara	30.000.000	4.089.000.000	Sosial Budaya
4	Pelatihan penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat (SIBAT)	Cimahi Selatan	15.000.000	2.400.000.000	Sosial Budaya
5	Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan BPJS	Cimahi Selatan	-	16.725.000.000	Sosial Budaya
6	Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan BPJS	Cimahi Tengah	676.050.000	11.024.400.000	Sosial Budaya
7	Pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan BPJS	Cimahi Utara	-	300.000.000	Sosial Budaya
8	Pelayanan kesehatan lansia dan pelatihan kader	Cimahi Selatan	60.000.000	2.325.000.000	Sosial Budaya
9	Pelayanan kesehatan lansia dan pelatihan kader	Cimahi Tengah	15.000.000	150.000.000	Sosial Budaya
10	Pelayanan kesehatan lansia dan pelatihan kader	Cimahi Utara	30.003.000	375.000.000	Sosial Budaya
11	Pembangunan gedung sekolah dan RKB	Cimahi Tengah	-	30	Sosial Budaya
12	Pembangunan gedung sekolah dan RKB	Cimahi Utara	-	-	Sosial Budaya
13	Pembangunan Puskesmas	Cimahi Tengah	-	-	Sosial Budaya
14	Pembangunan sarana peribadatan	Cimahi Selatan	9.304.500.000	47.977.500.000	Sosial Budaya
15	Pembangunan sarana peribadatan	Cimahi Utara	571.500.000	2.179.500.000	Sosial Budaya
16	Pemberian bantuan bagi penyandang cacat dan kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus	Cimahi Selatan	81.750.000	6.105.000.000	Sosial Budaya
17	Pemberian bantuan bagi penyandang cacat dan kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus	Cimahi Tengah	406.800.000	4.077.000.000	Sosial Budaya
18	Pemberian makanan tambahan bagi balita	Cimahi Selatan	30.000.000	1.423.500.000	Sosial Budaya
19	Pemberian makanan tambahan bagi balita	Cimahi Utara	30.000.000	430.500.000	Sosial Budaya
20	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara intensif	Cimahi Selatan	87.000.000	1.522.500.000	Sosial Budaya

No.	Kelompok Kegiatan	Kecamatan	Swadaya	APBD	Bidang
21	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara intensif	Cimahi Tengah	45.000.000	225.000.000	Sosial Budaya
22	Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara intensif	Cimahi Utara	19.500.000	427.500.000	Sosial Budaya
23	Penanganan PMKS	Cimahi Tengah	163.950.000	1.890.000.000	Sosial Budaya
24	Pendataan kembali warga miskin untuk program perlindungan sosial	Cimahi Selatan	28.500.000	1.605.000.000	Sosial Budaya
25	Pendataan kembali warga miskin untuk program perlindungan sosial	Cimahi Tengah	1.668.000.000	15.583.200.000	Sosial Budaya
26	Pendataan kembali warga miskin untuk program perlindungan sosial	Cimahi Utara	7.500.000	3.427.500.000	Sosial Budaya
27	Pendidikan SMP Gratis	Cimahi Selatan	30.000.000	225.000.000	Sosial Budaya
28	Pendidikan SMP Gratis	Cimahi Tengah	-	-	Sosial Budaya
29	Pendidikan SMP Gratis	Cimahi Utara	-	2.250.000.000	Sosial Budaya
30	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas	Cimahi Selatan	7.500.000	1.852.500.000	Sosial Budaya
31	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas	Cimahi Tengah	1.650.000.000	14.850.000.000	Sosial Budaya
32	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas	Cimahi Utara	-	750.000.000	Sosial Budaya
33	Peningkatan insentif kader KB	Cimahi Utara	18.000.000	426.000.000	Sosial Budaya
34	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cimahi Selatan	-	75.000.000	Sosial Budaya
35	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cimahi Tengah	73.500.000	339.000.000	Sosial Budaya
36	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Cimahi Utara	117.000.000	205.500.000	Sosial Budaya
37	Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	Cimahi Selatan	112.500.000	1.035.000.000	Sosial Budaya
38	Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	Cimahi Tengah	37.500.000	675.000.000	Sosial Budaya
39	Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan	Cimahi Utara	426.000.000	1.088.250.000	Sosial Budaya
40	Peningkatan perhatian dan bantuan kepada anak yatim, disabilitas, dan orang jompo	Cimahi Selatan	82.500.000	5.280.000.000	Sosial Budaya
41	Peningkatan perhatian dan bantuan kepada anak yatim, disabilitas, dan orang jompo	Cimahi Tengah	2.278.500.000	28.134.000.000	Sosial Budaya
42	Peningkatan perhatian dan bantuan kepada anak yatim, disabilitas, dan orang jompo	Cimahi Utara	34.500.000	2.152.500.000	Sosial Budaya
43	Peningkatan PHBS	Cimahi Selatan	37.500.000	195.000.000	Sosial Budaya
44	Peningkatan PHBS	Cimahi Tengah	168.000.000	870.000.000	Sosial Budaya
45	Peningkatan PHBS	Cimahi Utara	19.500.000	454.500.000	Sosial Budaya
46	Peningkatan sarana dan prasarana RW Siaga	Cimahi Tengah	420.750.000	6.735.000.000	Sosial Budaya
47	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Cimahi Tengah	-	75	Sosial Budaya
48	Peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan posbindu	Cimahi Selatan	633.000.000	10.998.750.000	Sosial Budaya
49	Peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan posbindu	Cimahi Tengah	416.250.000	6.418.500.000	Sosial Budaya
50	Peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan posbindu	Cimahi Utara	27.000.000	1.045.500.000	Sosial Budaya
51	Pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas dan jaringannya	Cimahi Utara	-	18.000.000	Sosial Budaya
52	Penyelenggaraan pendidikan non formal gratis	Cimahi Selatan	30.000.000	750.000.000	Sosial Budaya
53	Penyelenggaraan pendidikan non formal gratis	Cimahi Tengah	-	-	Sosial Budaya
54	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AID	Cimahi Selatan	6.000.000	1.500.000	Sosial Budaya
55	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AID	Cimahi Tengah	150.000.000	684.000.000	Sosial Budaya
56	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AID	Cimahi Utara	14.250.000	213.750.000	Sosial Budaya
57	Perlindungan Sosial (Anak Yatim, Anak Terlantar, Lansia Kurang Mampu)	Cimahi Selatan	7.500.000	285.000.000	Sosial Budaya
58	Perlindungan Sosial (Anak Yatim, Anak Terlantar, Lansia Kurang Mampu)	Cimahi Utara	37.500.000	270.000.000	Sosial Budaya
59	Santunan kematian bagi warga Cimahi yang memiliki KTP Cimahi	Cimahi Selatan	90.750.000	1.785.000.000	Sosial Budaya
60	Santunan kematian bagi warga Cimahi yang memiliki KTP Cimahi	Cimahi Utara	7.500.000	2.325.000.000	Sosial Budaya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renas PB merupakan dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada di Indonesia dalam kurun waktu antara 2015-2019 dan rencana pemerintah untuk mengurangi risiko tersebut melalui program-program kegiatan. Visi yang ingin dicapai dalam upaya penanggulangan bencana adalah : ***“Menjadikan Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana”***. untuk mewujudkan “bangsa yang tangguh bencana” tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Membangun efektivitas dalam upaya pengurangan risiko bencana pada kawasan yang memiliki risiko bencana, terutama pada pusat-pusat pertumbuhan pembangunan;
2. Meningkatkan efektivitas penanganan tanggap darurat;
3. Melakukan optimalisasi dan percepatan pemulihan wilayah pasca bencana, dan masyarakat yang terkena bencana untuk lebih mandiri;
4. Meningkatkan kemampuan dan akuntabilitas dalam tata kelola penanggulangan bencana.

Tujuan strategis dari penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang (2015- 2019) adalah :

1. Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana;
2. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan;
3. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana;
4. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
5. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
6. Peningkatan kapasitas pemulihan bencana;
7. Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana.

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019, maka sasaran strategis Renas PB 2015-2019 mengarahkan untuk:

-
1. Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah;
 2. Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah;
 3. Meningkatnya efektivitas mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 4. Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah;
 5. Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 6. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
 7. Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif;
 8. Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat;
 9. Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana. Arah kebijakan nasional yang akan diwujudkan melalui Renas PB 2015- 2019 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya upaya pengurangan risiko bencana secara efektif yang didukung dengan meningkatnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan aparat pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah dan kelembagaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan;
2. Terlaksananya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan keandalan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan kinerja sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;

3. Terlaksananya efisiensi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dengan hasil yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
4. Terlaksananya mekanisme dan sistem untuk menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi serta tata kelola penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan penanggulangan bencana, maka strategi yang akan ditempuh dalam Renas PB 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan PB;
2. Mengarusutamakan PB dalam pembangunan
3. Peningkatan efektivitas PB;
4. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat untuk PB;
5. Peningkatan kemitraan multi pihak dalam PB;
6. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
7. Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan pemulihan dampak bencana;
9. Penyiapan unsur pendukung pemulihan bencana;
10. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas tata kelola PB.

Dalam Renas PB 2015-2019 hanya memuat 1 (satu) program, yaitu “Program Penanggulangan Bencana” dan dengan 10 (sepuluh) sasaran di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program, Fokus Prioritas dan Sasaran PB

Program	Fokus Prioritas	Sasaran
Penanggulangan bencana	Penguatan kerangka hukum penanggulangan bencana	Tersedianya perangkat hukum yang mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan mandiri di tingkat pusat hingga daerah secara proporsional
	Pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam pembangunan	Terintegrasinya penanggulangan bencana pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah
		Meningkatnya efektivitas mekanisme

		penyelenggaraan penanggulangan bencana
	Peningkatan kemitraan multi pihak dalam penanggulangan bencana	Diterapkannya strategi yang menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat secara sinergi yang berorientasi kepada penurunan risiko bencana dengan kearifan lokal dan kemandirian daerah.
		Meningkatnya kemitraan multi-pihak (pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat sipil) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
	Peningkatan kapasitas pemulihan bencana	Tersedianya mekanisme pendukung dalam menjamin terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara mandiri, efektif dan bermartabat.
		Terselenggaranya pemulihan dampak bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
	Pemenuhan tata kelola bidang penanggulangan bencana	Meningkatnya kapasitas SDM serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana

Sementara dalam Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa isu-isu strategis pelayanan BPBD Provinsi adalah :

1. Pengkajian secara cepat, cermat dan tepat terhadap daerah berpotensi rawan bencana melalui upaya-upaya pencegahan dan kesiagaan jika terjadi bencana;
2. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
3. Pembentukan Pemuda Peduli Tanggap Bencana;
4. Menyiapkan Desa Tanggap Bencana di 26 kabupaten dan kota;
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
6. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
8. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa : penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;

-
9. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali sarana prasarana dan fasilitas masyarakat;
 10. Pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana.

Tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Terciptanya penanggulangan bencana yang akuntabel dan profesional;
2. Terwujudnya hubungan komunikasi yang harmonis dan dinamis serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap akibat bencana;
3. Terbentuknya masyarakat peduli bencana dan tanggap bencana serta tersedianya buffer stock dan peralatan sarana prasarana;
4. Tersedianya sistem informasi dan dokumentasi berbasis bencana;
5. Terwujudnya data kebutuhan infrastruktur dan lahan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme petugas yang menangani penanggulangan bencana;
2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana secara terpadu dan konseptual;
3. Mengembangkan metoda penanggulangan bencana yang komprehensif dan aplikatif;
4. Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam menangani masalah-masalah penanggulangan bencana;
5. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
6. Memadukan Rencana Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Rencana Tahunan SOPD terkait dan pemerintahan kabupaten/kota.

Visi Misi Wali Kota Cimahi selaras dengan visi misi Provinsi Jawa Barat sehingga dalam melaksanakan pembangunan di bidang penanggulangan bencana bisa selaras.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Cimahi

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi Kota Cimahi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, telah ditentukan aspek strategis yang diupayakan untuk Meningkatkan Profesionalisme Pencegahan dan Penanggulangan Bencana demi terwujudnya wilayah kota Cimahi yang kondusif dan tanggap darurat bencana. Berdasarkan hal tersebut di atas, aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebencanaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Seksi Kedaruratan dan Logistik.
4. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3.2.1. Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi dari walikota terpilih tahun 2017-2022 adalah ***Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya***. Adapun misi nya adalah sbb :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkepribadian, berahlak mulia, cerdas sehat dan unggul,
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik,
3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyataan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan,
4. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.**

-
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi berada di **misi 4 Wali Kota terpilih**. Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas yaitu:

1. Seribu (1000) lapangan kerja,
- 2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan**
3. Gratis Raskin,
4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,
5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,
6. Tambahan insentif RT RW,
7. Alokasi anggaran 100jt setiap RW,
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,
9. Tambahan penghasilan guru,
10. Tambahan insentive guru ngaji,
11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,
12. Bebas SPP,
13. Keringanan DSP SMU/SMK,
14. Kesejahteraan buruh,
15. Kestabilan keberlangsungan industri,
16. Kemudahan birokrasi,
17. Pembangunan Sekolah Negeri baru dan Universitas Negeri,
18. Pengembangan pasar tradisional,
19. Optimalisasi sarana olah raga,
20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,
21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.

Berdasarkan Peraturan Walikota Cimahi nomor 29 tahun 2015 tentang tugas, fungsi dan tata kerja organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah salah satu Perangkat Kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana dalam mendukung program-program

pemerintahan dan pembangunan di Kota Cimahi. Maka tupoksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk pada **program prioritas peringkat ke 2 (dua)**.

3.2.2 Visi dan Misi BPBD Kota Cimahi

1. Visi merupakan pedoman dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah : **"Meningkatkan Profesionalisme Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Demi Terwujudnya Wilayah Kota Cimahi Yang Kondusif dan Tanggap Darurat Bencana"**
2. Misi adalah sesuatu yang akan dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Misi menjadikan organisasi fokus sekaligus sebagai langkah aksi (*action plan*) dalam perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah :
 1. Kesiapan Sarana Prasarana Kesekretariatan dalam Rangk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
 2. Kesiapsiagaan Sumber Daya yang mumpuni untuk cegah dini dan tanggap darurat penanggulangan bencana alam.
 3. Kemampuan Profesionalisme dalam melakukan Rehabilitasi akibat Bencana Alam dan Perlindungan terhadap Korban Bencana Alam.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penangulungan Bencana Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi – misi sebagaimana tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi adalah : **"Meningkatkan Ketahanan Bencana"**

2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menetapkan sasaran sebagai berikut yaitu: ***“Meningkatnya Kesiapsiagaan Tanggap Bencana”***

3.3. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD penanggulangan bencana, BPBD menetapkan program dan kegiatannya pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Bencana

Sasaran : Menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Kota Cimahi

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
2. Mitigasi bencana
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparaturnya dan relawan
4. Pelatihan penaksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam
5. Pelatihan Penerapan Rancang Bangun Tahan Bencana dan Peralatan Yang Lebih Baik
6. Pelatihan Pengelolaan Data Dan Informasi Kejadian Bencana
7. Pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana
8. Pelatihan Trauma Healing Bagi Korban Bencana Alam
9. Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana
10. Pengembangan Aplikasi It Komunikasi Dan Kehumasan Tanggap Bencana

-
11. Pengelolaan logistik bagi korban bencana
 12. Peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana
 13. Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat

Sasaran : Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kegiatan Administrasi
Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Koordinasi dan konsultasi kedinasan
2. Pemeliharaan rumah dan gedung dinas
3. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas
4. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
5. Pengadaan mebeleur
6. Pengadaan seragam pegawai
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan gudang kantor
9. Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
10. Penyediaan jasa kebersihan kantor
11. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
12. Penyediaan makanan dan minuman
13. Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
14. Penyediaan peralatan rumah tangga

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur

Sasaran : Tercapainya target kinerja yang telah di rencanakan

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyusunan anggaran perangkat daerah
2. Penyusunan laporan inventaris barang
3. Penyusunan laporan keuangan
4. Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD
5. Penyusunan RENSTRA DAN RENJA PD
6. Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Tujuan : Peningkatan Kapasitas Pegawai

Sasaran : Terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 di BPBD Kota Cimahi di atas dapat dilihat pada tabel T-C.5 berikut ini :

Tabel T-C.5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA CIMAHI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN								
	PENDUKUNG PEMERINTAHAN								
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	(1)Persentase ASN Yang Dibina;		(1)100 Persen;	500.000.000			(1)100 Persen;	500.000.000
	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	(1)Jumlah ASN yang dibina;	Kota Cima	(1)23 Orang;	500.000.000	APBD KOTA		(1)23 Orang;	500.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	(1)Persentase Realisasi Anggaran;		(1)85 Persen;	1.350.000.000			(1)85 Persen;	1.350.000.000
	PENYUSUNAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH	(1)Jumlah Dokumen Anggaran;	Kota Cima	(1)4 Dokumen;	200.000.000	APBD KOTA		(1)4 Dokumen;	200.000.000
	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	(1)Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang;	Kota Cima	(1)8 Dokumen;	150.000.000	APBD KOTA		(1)8 Dokumen;	150.000.000
	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	(1)Jumlah Dokumen Laporan keuangan;	Kota Cima	(1)4 Dokumen;	350.000.000	APBD KOTA		(1)4 Dokumen;	350.000.000
	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	(1)jumlah dokumen monev;	Kota Cima	(1)7 Dokumen;	300.000.000	APBD KOTA		(1)7 Dokumen;	300.000.000
	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	(1)jumlah dokumen RENJA; (2)jumlah dokumen RENSTRA;	Kota Cima	(1)1 Dokumen; (2)0 Dokumen;	300.000.000	APBD KOTA		(1)1 Dokumen; (2)0 Dokumen;	300.000.000
	PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN OPERASIONAL DAN PROSEDUR PD	(1)jumlah SOP;	Kota Cima	(1)14 SOP;	50.000.000	APBD KOTA		(1)14 SOP;	50.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	(1)Persentase Koordinasi Dan Konsultasi Yang Difasilitasi;		(1)100 Persen;	3.346.006.960			(1)100 Persen;	3.346.006.960
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	(1)jumlah perjalanan dinas;	Kota Cima	(1)12 Bulan;	280.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	280.000.000
	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas;	Kota Cima	(1)12 Bulan;	132.626.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	132.626.000
	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	(1)Jumlah Kendaraan asuransi yang di bayar; (2)Jumlah Kendaraan yang dipelihara; (3)Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; (4)Jumlah Pengadaan Kendaraan;	Kota Cima	(1)19 Unit; (2)19 Unit; (3)19 Unit; (4)19 Unit;	1.476.300.000	APBD KOTA		(1)19 Unit; (2)19 Unit; (3)19 Unit; (4)19 Unit;	1.476.300.000
	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan kantor; (2)Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor;	Kota Cima	(1)12 Bulan; (2)3 Paket;	250.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan; (2)3 Paket;	250.000.000
	PENGADAAN MEBELEUR	(1)Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeulair Kantor; (2)Jumlah Pengadaan Mebeulair Kantor;	Kota Cima	(1)12 Bulan; (2)1 Paket;	200.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan; (2)1 Paket;	200.000.000
	PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	(1)Jumlah Set Seragam Pegawai;	Kota Cima	(1)3 Paket;	300.000.000	APBD KOTA		(1)3 Paket;	300.000.000
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	(1)Jumlah Bulan Penyediaan ATK;	Kota Cima	(1)12 Bulan;	38.200.960	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	38.200.960
	PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	(1)Jumlah Gudang dan Kantor;	Kota Cima	(1)2 Unit;	250.000.000	APBD KOTA		(1)2 Unit;	250.000.000
	PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	(1)Jumlah Bulan THL yang di asuransikan;	Kota Cima	(1)12 Bulan;	120.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	(1)Jumlah Bulan Jasa dan alat Kebersihan Kantor;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	75.980.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	75.980.000
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	(1)Jumlah Bulan Jasa Air; (2)Jumlah Bulan Jasa Komunikasi; (3)Jumlah Bulan Jasa Listrik;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)12 Bulan;	44.400.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)12 Bulan;	44.400.000
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	(1)Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan;	60.000.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan;	60.000.000
	PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	(1)Jumlah Bulan Penggandaan; (2)Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi; (3)Jumlah Jenis Cetakan;	Kota Cimahi	(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)1 Paket;	68.500.000	APBD KOTA		(1)12 Bulan; (2)12 Bulan; (3)1 Paket;	68.500.000
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	(1)Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga;	Kota Cimahi	(1)5 Set;	50.000.000	APBD KOTA		(1)5 Set;	50.000.000
	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR								
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT								
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA	(1)Peresentase Korban Bencana Yang Di Evakuasi ;		(1)100 Persen;	3.154.608.874			(1)100 Persen;	3.247.137.102
	FASILITASI DAN STIMULASI REHABILITASI RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM	(1)Jumlah rumah yang diperbaiki akibat bencana;	Kota Cimahi	(1)50 Rumah;	600.000.000	APBD KOTA		(1)50 Rumah;	600.000.000
	MITIGASI BENCANA	(1)Dokumen kajian;	Kota Cimahi	(1)0 Dokumen;	350.000.000	APBD KOTA		(1)1 Dokumen;	350.000.000
	PELATIHAN DASAR KEBENCANAAN BAGI APARATUR DAN RELAWAN	(1)Jumlah aparatur dan relawan yang mendapatkan pelatihan kebencanaan;	Kota Cimahi	(1)50 Orang;	250.000.000	APBD KOTA		(1)50 Orang;	250.000.000
	PELATIHAN PENANKSIRAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM	(1)Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan;	Kota Cimahi	(1)50 Orang;	232.000.000	APBD KOTA		(1)50 Orang;	232.000.000
	PELATIHAN PENERAPAN RANCANG BANGUN TAHAN BENCANA DAN PERALATAN YANG LEBIH BAIK	(1)Jumlah Relawan dari 15 Kelurahan;	Kota Cimahi	(1)100 Orang;	100.000.000	APBD KOTA		(1)100 Orang;	100.000.000
	PELATIHAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEJADIAN BENCANA	(1)Jumlah Relawan dan aparatur;	Kota Cimahi	(1)70 Orang;	107.000.000	APBD KOTA		(1)80 Orang;	150.000.000
	PELATIHAN SIMULASI PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA	(1)Jumlah titik simulasi (Sekolah, Perguruan Tinggi dan Perkantoran);	Kota Cimahi	(1)8 Titik;	200.000.000	APBD KOTA		(1)8 Titik;	200.000.000
	PELATIHAN TRAUMA HEALING BAGI KORBAN BENCANA ALAM	(1)Jumlah Relawan dan aparatur;	Kota Cimahi	(1)60 Orang;	150.000.000	APBD KOTA		(1)60 Orang;	150.000.000
	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN POTENSI BENCANA	(1)Jumlah titik rawan bencana di kelurahan yang terpantau;	Kota Cimahi	(1)15 Kelurahan;	300.000.000	APBD KOTA		(1)15 Kelurahan;	300.000.000
	PENGELOLAAN LOGISTIK BAGI KORBAN BENCANA	(1)jumlah kejadian bencana yang ditangani dan jumlah logistik yang didistribusikan;	Kota Cimahi	(1)90 Kejadian;	200.000.000	APBD KOTA		(1)90 Kejadian;	225.000.000
	PENGEMBANGAN APLIKASI IT KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN TANGGAP BENCANA	(1)Sistem aplikasi kebencanaan;	Kota Cimahi	(1)Maintenance Aplikasi;	90.608.874	APBD KOTA		(1)Maintenance Aplikasi;	90.137.102
	PENINGKATAN KAPASITAS TANGGAP DARURAT BENCANA	(1) Jumlah pelatihan ; (2)Jumlah paket perlengkapan tanggap darurat bencana;	Kota Cimahi	(1)20 Orang; (2)1 Paket;	325.000.000	APBD KOTA		(1)20 Orang; (2)1 Paket;	325.000.000
	PERBAIKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN PASCA BENCANA	(1)jumlah lingkungan yang revitalisasi;	Kota Cimahi	(1)3 Lingkungan;	250.000.000	APBD KOTA		(1)3 Lingkungan;	275.000.000
Total					8.350.615.834				8.443.144.062

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KOTA CIMAHI

Rencana kerja BPBD Kota Cimahi untuk tahun 2020 terdiri dari 4 Program dan 34 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

2.1 Rencana Kerja Tahun 2020

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA

Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Bencana

Sasaran : Menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat Kota Cimahi

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana merupakan upaya penanggulangan pasca bencana. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 600.000.000,- dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Belanja bantuan sosial berupa bahan material/bangunan bagi korban untuk Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam dan Upah pekerja bangunan untuk 50 rumah

Output : Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana bagi warga Kota Cimahi

Outcome : Terfasilitasinya masyarakat korban bencana yang membutuhkan bantuan

Dampak : Meningkatnya kenyamanan hidup masyarakat korban bencana

Manfaat : Meningkatnya ketahanan bencana

2. Mitigasi bencana

Kegiatan Kajian Mitigasi Kebencanaan merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 350.000.000,-

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembentukan kelurahan tangguh bencana di 4 Kelurahan

Output :

- Tersusunnya kajian mitigasi bencana longsor
- Terbentuknya 3 (tiga) Kelurahan tangguh bencana

Outcome : Meningkatnya upaya untuk mengurangi risiko bencana

Dampak : Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk

Manfaat : Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan

3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparaturnya dan relawan

Kegiatan Pelatihan Dasar Kebencanaan Bagi Aparatur dan Relawan. merupakan kegiatan pelatihan aparaturnya dan relawan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dasar sumber daya manusia dalam menangani darurat bencana di Kota Cimahi Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 250.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Dasar Kebencanaan bagi 50 orang aparaturnya dan relawan

Output : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan dasar kebencanaan

Outcome : Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia mengenai dasar kebencanaan

Dampak : Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Manfaat : Meningkatnya penanggulangan korban bencana yang tepat dan cepat

4. Pelatihan penaksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam

Kegiatan Pelatihan Pelatihan penaksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam diperuntukkan bagi aparatur pada instansi terkait di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam menangani darurat bencana di Kota Cimahi agar berjalan secara cepat dan efisien Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 232.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan penaksiran kerusakan dan kerugian akibat bencana alam bagi 50 orang aparatur

Output : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan dalam penaksiran kerugian akibat bencana alam

Outcome : Meningkatnya keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia mengenai penaksiran kerugian akibat bencana alam

Dampak : Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Manfaat : Meningkatnya penanggulangan korban bencana yang tepat dan cepat

5. Pelatihan penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih baik

Kegiatan Pelatihan penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih baik bertujuan untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat/relawan yang berada di 15 wilayah Kelurahan mengenai penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih baik. kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah korban kerugian dan jumlah korban yang ditimbulkan akibat bencana Anggaran yang disediakan sebesar Rp.100.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan diperuntukkan bagi relawan yang terdiri dari perwakilan wilayah/kelurahan se-Kota Cimahi sebanyak 100 orang

Output : Terlaksananya Pelatihan penerapan rancang bangun tahan bencana dan peralatan yang lebih baik

Outcome : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

Dampak : Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Manfaat : Mengurangi jumlah korban kerugian dan jumlah korban yang ditimbulkan akibat bencana

6. Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kejadian Bencana

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kejadian Bencana meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kapasitas aparatur/pegawai BPBD dalam pengelolaan data dan informasi kejadian bencana di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.107.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kejadian Bencana diperuntukkan bagi aparat dan relawan yang terdiri dari 70 orang peserta

Output : Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi Kejadian Bencana

Outcome : Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kapasitas aparatur/pegawai BPBD

Dampak : Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Manfaat : Pengelolaan data dan informasi kebencanaan yang baik, akan mempermudah dalam pengambilan keputusan/kebijakan pucuk pimpinan dan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

7. Pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana

Kegiatan pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana bertujuan untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat khususnya

pelajar dan mahasiswa mengenai penanganan tanggap darurat bencana melalui simulasi kejadian bencana. kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah korban kerugian dan jumlah korban yang ditimbulkan akibat bencana Anggaran yang disediakan sebesar Rp.. 200.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Pelatihan simulasi akan dilaksanakan di tiga titik (sekolah) dan melibatkan seluruh warga sekolah.

Output : Terlaksananya pelatihan simulasi penanganan tanggap darurat bencana

Outcome : Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana

Dampak : Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Manfaat : Meningkatnya penanggulangan korban bencana yang tepat dan cepat

8. Pelatihan trauma healing bagi korban bencana alam

Kegiatan Pelatihan trauma healing bagi korban bencana alam bertujuan untuk melakukan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparaturnya dan relawan dalam penanganan korban bencana secara mental dan psikologi. kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi trauma bagi korban bencana Anggaran yang disediakan sebesar Rp.150.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan trauma healing bagi korban bencana alam diperuntukkan bagi aparaturnya dan relawan sebanyak 60 orang.

Output : Terlaksananya Pelatihan trauma healing bagi korban bencana alam

Outcome : pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparaturnya dan relawan

Dampak : Meningkatnya kesiapan dalam menghadapi bencana

Manfaat : Penanggulangan mental dan psikologi yang tepat terhadap korban bencana

9. Pemantauan dan penyebarluasan potensi bencana

Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam merupakan program pencegahan bencana dengan melakukan pemantauan titik-titik potensi bencana di seluruh Kota Cimahi dan upaya penyebaran informasi potensi bencana, agar masyarakat waspada terhadap ancaman bencana alam dan salah satu upaya pengurangan rasio korban bencana. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 300.000,000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pemantauan titik-titik potensi rawan bencana ke 15 Kelurahan, Pelaksanaan kegiatan simulasi bencana melalui pelaksanaan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Output :

- Terpantaunya titik-titik potensi bencana
- Terlaksananya simulasi bencana sekaligus memperingati HKBN

Outcome : Terpantau dan tersampainya informasi titik potensi bencana

Dampak : Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana

Manfaat : Memperkecil jumlah korban dan kerugian akibat kejadian bencana

10. Pengelolaan logistik bagi korban bencana

Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar/logistik bagi korban bencana. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 200.000.000,-. Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan Obat-obatan P3K dan alat-alat kesehatan, barang/logistik bagi korban bencana, pembayaran honor petugas pengelola gudang logistik dan peralatan

Output : Terlaksananya

- Pengadaan obat-obatan
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan barang/logistik bagi korban bencana
- Pengelolaan dan pendistribusian logistik
- Terlaksananya proses evakuasi secara cepat dan kaji cepat bagi korban bencana di wilayah Kota Cimahi

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana dan evakuasi korban bencana

Dampak : Meningkatkan kenyamanan dan meringankan beban masyarakat yang menjadi korban.

Manfaat : Meningkatkan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.

11. Pengembangan Aplikasi IT Komunikasi dan Kehumasan Tanggap Bencana

Kegiatan Pengembangan Aplikasi IT Komunikasi dan Kehumasan Tanggap Bencana terdiri dari kegiatan pengembangan aplikasi IT komunikasi dan kehumasan, pengadaan perangkat dan *maintenance* perangkat. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 90.608.874,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Aplikasi IT Komunikasi dan Kehumasan Tanggap Bencana merupakan kegiatan pengembangan aplikasi IT komunikasi dan kehumasan, pengadaan perangkat dan *maintenance* perangkat untuk kegiatan Pusdatin dan Pusdalops di BPBD Kota Cimahi

Output :

- Terlaksananya Pembuatan Web Site
- Pengadaan perangkat komunikasi dan kehumasan kebencanaan

-
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pusdatin dan pusdalpos BPBD Kota Cimahi

- Pemeliharaan perangkat komunikasi dan kehumasan kebencanaan

Outcome : Lancarnya kegiatan operasional Pusdatin dan Pusdalops

Dampak : Informasi dan peringatan dini terhadap bencana di Kota Cimahi dapat dengan cepat disampaikan kepada seluruh masyarakat.

Manfaat : Pengelolaan data dan informasi kebencanaan yang baik, akan mempermudah dalam pengambilan keputusan/kebijakan pucuk pimpinan dan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

12. Peningkatan kapasitas tanggap darurat bencana

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tanggap Darurat Bencana merupakan kegiatan pelatihan aparatur dan relawan dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM dalam menangani darurat bencana di Kota Cimahi. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 325.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Terlaksananya Pelatihan gabungan tim tanggap darurat bencana, Pemeliharaan kesehatan/kebugaran aparatur dan satuan tugas, dan Pembayaran Honor Satuan Tanggap Darurat Bencana

Output :

- Terlaksananya Pelatihan gabungan tim tanggap darurat bencana
- Terlaksananya Pelaksanaan pemeliharaan kebugaran aparatur BPBD
- Lancarnya Pembayaran honor satuan tanggap darurat bencana

Outcome : Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan tanggap darurat bencana

Dampak : Meningkatnya kemampuan aparatur dan relawan dalam menghadapi kondisi darurat bencana

Manfaat : Dengan tersedianya aparaturnya dan relawan yang terampil dapat mempercepat waktu penyelamatan korban dan meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

13. Perbaikan pemulihan lingkungan pasca bencana

Kegiatan Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana merupakan upaya untuk merevitalisasi lingkungan pasca bencana yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan pasca terjadi bencana. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 250.000.000,-. Dengan Indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pelaksanaan Perbaikan dan Pemulihan Lingkungan Daerah Pasca Bencana, pengerukan lokasi pasca bencana dengan menggunakan alat berat, berupa escavator dan pengangkutan hasil pengerukan dengan menggunakan dump truck, serta penanaman pohon di lokasi terjadi bencana.

Output : Terlaksananya perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana

Outcome : Meningkatnya kualitas lingkungan daerah pasca bencana

Dampak : Meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat korban bencana

Manfaat : Perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah pasca bencana dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tujuan : Meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat

Sasaran : Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kegiatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Koordinasi dan konsultasi kedinasan

Kegiatan koordinasi dan konsultasi kedinasan merupakan kegiatan koordinasi dan konsultasi vertikal dengan berbagai instansi terkait, baik di tingkat

provinsi maupun di tingkat pusat, untuk mendapatkan keselarasan dan kesesuaian program kegiatan pada tingkat Kota Cimahi dengan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 280.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Melaksanakan perjalanan BPBD dalam dan luar daerah oleh Pejabat Eselon II, III dan IV serta Pegawai BPBD

Output : Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcome : Ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dengan institusi terkait sesuai dengan bidang tugas BPBD

Dampak : Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan institusi terkait dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan program kegiatan

Manfaat : Diperolehnya data dan informasi serta berbagai aspek pemahaman yang terkait dengan penyusunan rencana kerja, kebijakan teknis dan strategis dinas terkait di Provinsi Jawa Barat, Kementerian dan instansi terkait lainnya.

2. Pemeliharaan rumah dan gedung dinas

Kegiatan Pemeliharaan rumah dan gedung dinas merupakan kegiatan pokok rutin yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 132.626.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung/Kantor berupa Pengadaan bahan baku bangunan dan belanja jasa tukang

Output :

- Pemeliharaan gedung kantor
- Pembelian bahan baku bangunan

- Belanja jasa upah tukang

Outcome : Terpeliharanya gedung kantor

Dampak : Terciptanya kenyamanan lingkungan kerja/kantor

Manfaat : Meningkatnya produktivitas kerja pegawai

3. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas

Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan kendaraan dinas merupakan kegiatan pokok rutin yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.476.300.000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Belanja BBM dan Pelumas Kendaraan, Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah berupa 3 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 , Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan, Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan kendaraan roda 2

Output :

- (1) Pembayaran Kendaraan asuransi yang di bayar;
- (2)Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 3 unit roda 4 dan 2 unit roda 2
- (3)Terlaksananya belanja Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- (4)Terlaksananya Pengadaan Kendaraan;

Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk mendukung kelancaran dan mobilitas kerja

Dampak : Lancarnya kegiatan operasional dan mobilitas BPBD

4. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor

Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan pokok rutin yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Belanja pemeliharaan peralatan kantor dan pengadaan peralatan kantor

Output :

- Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
- Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi kantor

Dampak : Lancarnya kegiatan operasional

Manfaat : Meningkatnya produktivitas pegawai

5. Pengadaan mebeleur

Kegiatan Pengadaan Mebeleur Kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan : Terlaksanya belanja barang Mebeleur

Output : Terlaksananya Pengadaan Lemari arsip, Filling Kabinet, Meja Kerja Kayu, Kursi Rapat, Meja Bundar/Oval, Meja/Kursi Tamu, Meja Resepsionis, Bangku Tunggu, Papan pengumuman, lemari buku, lemari pakaian

Outcome : Terasilitasinya kegiatan administrasi dan operasional perkantoran

Dampak : Meningkatkan Kinerja Aparatur

Manfaat : Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat

6. Pengadaan seragam pegawai

Kegiatan pengadaan pakaian seragam pegawai merupakan kegiatan yang mendukung peningkatan disiplin aparatur BPBD. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000,000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan: Pengadaan pakaian seragam pegawai beserta perlengkapannya

Output : Terlaksananya pengadaan seragam pegawai

Outcome : Tersedianya seragam pegawai untuk meningkatkan disiplin aparatur

Dampak : Meningkatnya disiplin pegawai

Manfaat : Meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai

7. Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor merupakan kegiatan pokok/rutin penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 38.200.960,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan : Pembelian alat tulis kantor untuk 1 tahun anggaran

Output : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Outcome : Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

Dampak : Meningkatnya produktivitas kerja pegawai

Manfaat : Meningkatkan pelayanan

8. Penyediaan gudang kantor

Kegiatan penyediaan gudang kantor merupakan kegiatan penunjang yang mendukung terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi perkantoran dan operasional kantor. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 250.000.000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Sewa gedung/kantor/tempat untuk 1 tahun

Output : Terlaksananya sewa gedung kantor

Outcome : Tersedianya tempat untuk kegiatan administrasi dan operasional kantor

Dampak : Lancarnya kegiatan administrasi & operasional kantor

Manfaat : Terselenggaranya kegiatan administrasi dan operasional kantor sehingga dapat melaksanakan fungsi BPBD

9. Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan

Kegiatan Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan kegiatan yang mendukung meningkatnya kesejahteraan pegawai BPBD.

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000.-
dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Pembayaran premi asuransi satgas dan THL

Output :

- Belanja premi asuransi kesehatan satgas dan THL
- Belanja premi asuransi ketenagakerjaan satgas dan THL

Outcome : Terfasilitasinya kesehatan dan ketenagakerjaan pegawai BPBD

Dampak : Lancarnya kegiatan administrasi dan operasional perkantoran

Manfaat : Peningkatan produktivitas dan kinerja pegawai

10. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional. Anggaran untuk kegiatan ini Rp. 75.980.000,-
dengan indikator kegiatan kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

- Pemeliharaan kebersihan dan penyediaan peralatan kebersihan kantor.
- Pembayaran honorarium petugas kebersihan.

Output :

- Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Pembayaran honor petugas cleaning service

Outcome: Terlaksananya kegiatan jasa kebersihan kantor

Dampak : Terciptanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja/kantor

Manfaat : Meningkatnya produktivitas kerja pegawai.

11. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air merupakan penunjang kelancaran operasional. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.400.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan :

Pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet selama 1 tahun anggaran (12 bulan)

Output : Terlaksananya Pembayaran Rekening Listrik, Telepon dan Internet

Outcome : Tersedianya kebutuhan energi listrik, komunikasi dan informasi

Dampak : Terlaksananya kegiatan operasional kantor

Manfaat : Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi dan komunikasi perkantoran

12. Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan : Penyediaan Makanan dan minuman rapat

Output : Tersedianya Makanan dan minuman rapat

Outcome : Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat Dinas

Dampak : Terlaksananya kegiatan pelayanan umum dan urusan rumah tangga BPBD

Manfaat : Meningkatnya kinerja dan koordinasi aparatur

13. Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 68.500.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan :

Pengadaan surat kabar harian, mingguan, majalah dan buku-buku peraturan, barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Output :

(1) Terfasilitasinya kegiatan penggandaan selama 1 tahun

(2) Tersedianya Media Informasi berupa majalah/surat kabar

(3) Tersedianya barang cetakan untuk operasional kantor

Outcome : lancarnya kegiatan operasional dan meningkatnya informasi pegawai

Dampak : Meningkatnya pelayanan umum dan urusan rumah tangga berdasar pada ketentuan teoritis dan yuridis dengan memanfaatkan sumber bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Manfaat : Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas.

14. Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga kantor merupakan kegiatan penunjang kelancaran operasional kantor. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan : Penyediaan peralatan rumah tangga

Output : Terlaksananya Pengadaan Peralatan rumah tangga

Outcome : Tersedianya peralatan rumah tangga

Dampak : Terfasilitasinya kebutuhan pegawai

Manfaat : Lancarnya kegiatan urusan rumah tangga BPBD

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Tujuan : Meningkatkan kinerja aparatur

Sasaran : Tercapainya target kinerja yang telah di rencanakan

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyusunan anggaran perangkat daerah

Kegiatan Penyusunan anggaran perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah karena akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan Dokumen RKA, RKA-P, DPA, DPA-P

Output :

Terususunnya Penyusunan Dokumen anggaran berupa RKA, RKA-Perubahan, DPA, DPA-Perubahan

Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan anggaran

Dampak : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.

Manfaat : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

2. Penyusunan laporan inventaris barang

Kegiatan Penyusunan Penyusunan laporan inventaris barang merupakan kegiatan rutin pencatatan aset yang dimiliki oleh suatu organisasi. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan inventaris barang

Output : Terlaksananya Penyusunan laporan inventaris barang BPBD

Outcome : Tersedianya data dan informasi inventaris barang yang dikuasai BPBD

Dampak : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.

Manfaat : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

3. Penyusunan laporan keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan merupakan kegiatan rutin untuk mewujudkan administrasi laporan keuangan yang sistematis, akuntabel dan transparan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 350.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan : Penyusunan laporan keuangan bulanan, semester dan laporan akhir tahun

Output : Tersusunnya 15 dokumen pelaporan keuangan

Outcome : Terlaksananya pelaporan keuangan

Dampak : Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi realisasi keuangan BPBD

Manfaat : Terwujudnya sistem administrasi pelaporan keuangan yang sistematis dan akuntabel

4. Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD

Pelaksanaan dan pemenuhan tugas dan fungsi BPBD Kota Cimahi harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sehingga keterukuran kinerja ini perlu dituangkan dalam sebuah dokumen monev dan pelaporan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja berupa LAKIP LKPJ, LPPD, Monev Kinerja dan e reporting

Output : Tersusunnya dokumen pelaporan kinerja LAKIP LKPJ, LPPD, Monev Kinerja dan e reporting

Outcome : Meningkatnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dampak : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.

Manfaat : Meningkatnya persentase kinerja BPBD

5. Penyusunan RENSTRA DAN RENJA PD

Kegiatan Penyusunan RENSTRA DAN RENJA PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah karena akan menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan:

Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi

Output : Tersusunnya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi

Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan kinerja

Dampak : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.

Manfaat : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

6. Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD

Kegiatan Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD merupakan dokumen panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap elemen atau unit . Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan: Penyusunan SOP Kegiatan Operasional dan Pendukung Tupoksi BPBS

Output : Terusunnya SOP Kegiatan Operasional dan Pendukung Tupoksi BPBS

Outcome : Tersedianya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

Dampak : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana yang transparan, partisipatif, akuntabel dan responsif.

Manfaat : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Tujuan : Peningkatan Kapasitas Pegawai

Sasaran : Terlaksananya pembinaan dan pelatihan bagi pegawai

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai merupakan kegiatan yang mendukung meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur BPBD. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000.- dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan: Pelaksanaan Pembinaan Pegawai BPBD peningkatan kapasitas pegawai melalui pengiriman peserta bimtek/diklat

Output :

-
- Terlaksananya kegiatan pembinaan pegawai
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai melalui diklat/bimtek

Outcome: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur

Dampak :Peningkatan kualitas SDM di BPBD

Manfaat :Peningkatan produktivitas dan kinerja pegawai

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 tentunya tidak terlepas dari Rencana Strategis / RPJMD Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu penyusunan Renja ini mengacu kepada RPJMD Kota Cimahi dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya masih perlu adanya perbaikan dari rencana kerja yang akan dilaksanakan ini. Dan tentunya perbaikan-perbaikan ini dimaksudkan untuk terjadinya perencanaan yang ideal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rencana Kerjanya Tahun 2020.

Namun demikian kami berharap melalui penyusunan Rencana Kerja ini akan memberikan arah/pedoman terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi agar tidak melenceng terhadap program dan kegiatan yang telah ditentukan tersebut. Sehingga arah kebijakan yang akan dilakukan tidak bergeser dari rencana awal.